

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2021 – 2026**



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

JL. PAHLAWAN NO. 14 PAYAKUMBUH  
TELP. 0752-92049 FAX. 0752-91094

## KATA PENGANTAR

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 yang dikatakan sebagai perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan perlu dilakukan dalam kerangka visi, misi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 ini dibuat sebagai pedoman perencanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2021 - 2026.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang di OPD ini dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan stakeholders peternakan lainnya. Hal ini telah dan sedang dilaksanakan. Diharapkan pada Rancangan Akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra-OPD dapat disajikan sesuai dengan aturan. Rancangan Akhir Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Rancangan Akhir Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan direndhai oleh Allah SWT.

Payakumbuh, 23 September 2021

**Pt. KEPALA DINAS PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. INDRA SURIANI**  
NIP. 19670812 199303 2 011

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	14
2.2 Sumber Daya OPD .....	30
2.3 Kinerja Pelayanan .....	39
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Disnak & Keswan .....	48
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISNAK DAN KESWAN.....	58
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disnak&Keswan.....	58
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	63
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan Provinsi.....	64
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	68
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	74
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....	78
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	78
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	80
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	82
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	87

PETERNAKAN DAN KESWAN .....

BAB VIII : PENUTUP ..... 88

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel Jumlah Pegawai Disnak Keswan berdasarkan tingkat golongan	.....	30
2.	Tabel jumlah pegawai Disnak Keswan berdasarkan tingkat pendidikan	.....	30
3.	Tabel Jumlah Kelompok Terdaftar	.....	36
4.	Tabel Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota	.....	37
5.	Tabel Produksi Telur	.....	38
6.	Tabel Produksi Daging	.....	38
7.	Tabel KK Pemelihara Ternak	.....	38
8.	Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disnak Keswan	.....	40
9.	Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Disnak dan Keswan	.....	44
10.	Tabel T-B.35 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	.....	59
11.	Tabel 3.3 telaahan pelayanan Disnak dan Keswan Prov. Sumbar berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Pertanian RI	.....	66
12.	Tabel 3.4 permasalahan Pelayanan Disnak dan Keswan Prov. Sumbar Berdasarkan Renstra Lingkup Kabupaten Kota yang Menangani Peternakan	.....	67
13.	Tabel 3.5 Telaahan Rancangan Tata Ruang Wilayah	.....	72
14.	Tabel 3.6 Hasil Telaahan Pola Ruang Kab. Lima Kota	.....	73
15.	Tabel T.-C.25 tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disnak dan Keswan Kab. LPK	.....	79
16.	Tabel T-C.26 Tujuan,sasaran dan strategi kebijakan	.....	81
17.	Tabel T-C.27 rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja	.....	83
18.	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Disnak & Keswan		
19.	Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran	.....	87

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai institusi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif dan menjadi perangkat penting bagi institusi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya serta membantu perangkat institusi untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program serta kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis berfokus pada upaya sistematis yang dilakukan institusi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi serta pengembangan suatu visi yang luas. Melalui perencanaan strategis seluruh perangkat institusi berkomitmen untuk membangun visi mengidentifikasi potensi dan menetapkan strategi spesifik berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi dan lingkungan meliputi kekuatan internal dan eksternal termasuk peluang, kecenderungan dan dampak terhadap organisasi.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan.

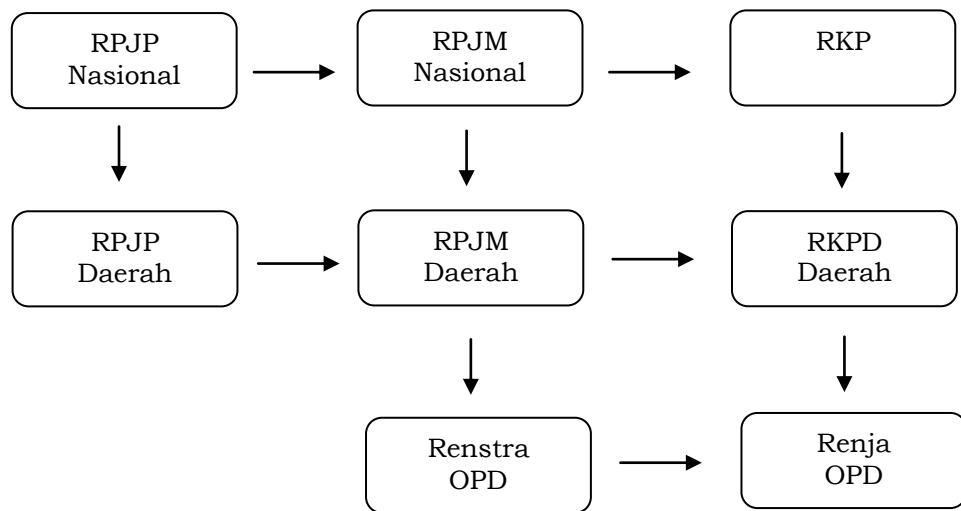
Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota disamping berpedoman dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian khususnya Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 - 2024, dimana tugas pokok Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyusun kebijakan dibidang produksi ternak dan pengembangan ternak dengan fungsi mencakup kebijakan dibidang perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan (Renstra Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 – 2024), Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dengan program prioritas Pengembangan bibit unggul dan kesehatan hewan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga tidak mengabaikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang peternakan baik pada tingkat global, nasional maupun regional.

Pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Peternak dan meningkatkan Produk Peternakan yang Berkualitas meningkatkan melalui peningkatan Produksi pangan asal ternak, peningkatan pemasaran produk peternakan, peningkatan status kesehatan hewan yang dilaksanakan melalui kegiatan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Penjabaran Program pembangunan peternakan diletakkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dengan lebih memberikan peluang kepada partisipasi aktif masyarakat. Sesuai dengan titik berat Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota, maka kewenangan yang dimiliki Kabupaten/Kota lebih banyak bersifat pelaksanaan atau operasional kegiatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain untuk turut mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan mewujudkan pembangunan peternakan yang terarah serta sistematis sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan peternakan tahun 2021 – 2026 yang dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, hingga penyusunan rancangan akhir Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan dengan tahapan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :



Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah. Disamping itu penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota mempedomani Renstra Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan tahun 2020 – 2024 dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 serta RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga keseluruhan dokumen tersebut menjadi acuan untuk penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra yang telah disusun akan diturunkan menjadi Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap tahunnya yang dituangkan dalam RKPD kabupaten untuk selanjutnya menjadi program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mewujudkan tujuan dan mencapai target Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional.
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 Pusat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
23. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 117).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 3)
30. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang RTRW Kabupten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2012);
31. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 65);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra disusun sebagai penjabaran operasional Visi dan Misi Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 2021 – 2026. Maksud penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sejalan dengan perubahan RPJMD dan IKU Kepala Daerah.
2. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama 5 (lima) tahun ke depan setelah dilakukan perubahan RPJMD diikuti dengan perubahan dan penyempurnaan Renstra OPD.

Berkaitan dengan maksud di atas Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini ditujukan untuk :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menetapkan Program, Kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026

4. Memberi arah dan mendorong seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar memiliki semangat dan kinerja dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasannya.
6. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. Pendahuluan**

###### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan pembangunan peternakan, keterkaitan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan RPJMD, Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan dengan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

###### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan, struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditujukan

untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Proses, prosedur, mekanisme)

## 2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang memiliki Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan sasaran / target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III. Permasalahan dan Isu-isu strategis Dinas Peternakan dan**

#### **Kesehatan Hewan**

### 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian **Tabel T-B.35**

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (**tabel T-B.35**), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pemndorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian ataupun Renstra Dinas Peternakan dan Kesehstan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.



### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## **BAB IV. Tujuan dan Sasaran**

BAB ini menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel **T-C.25**

## **BAB V. Strategis dan Arah Kebijakan**

Bab ini menjelaskan rumusan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun kedepan.

## **BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja yang merupakan penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta indikasi

pendanaan dan sumber daya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Indikator kinerja merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur.

#### **BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bab ini memuat indikator OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII. Penutup**

Bab ini berisi catatan penting dalam rangka pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut (RTL).

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

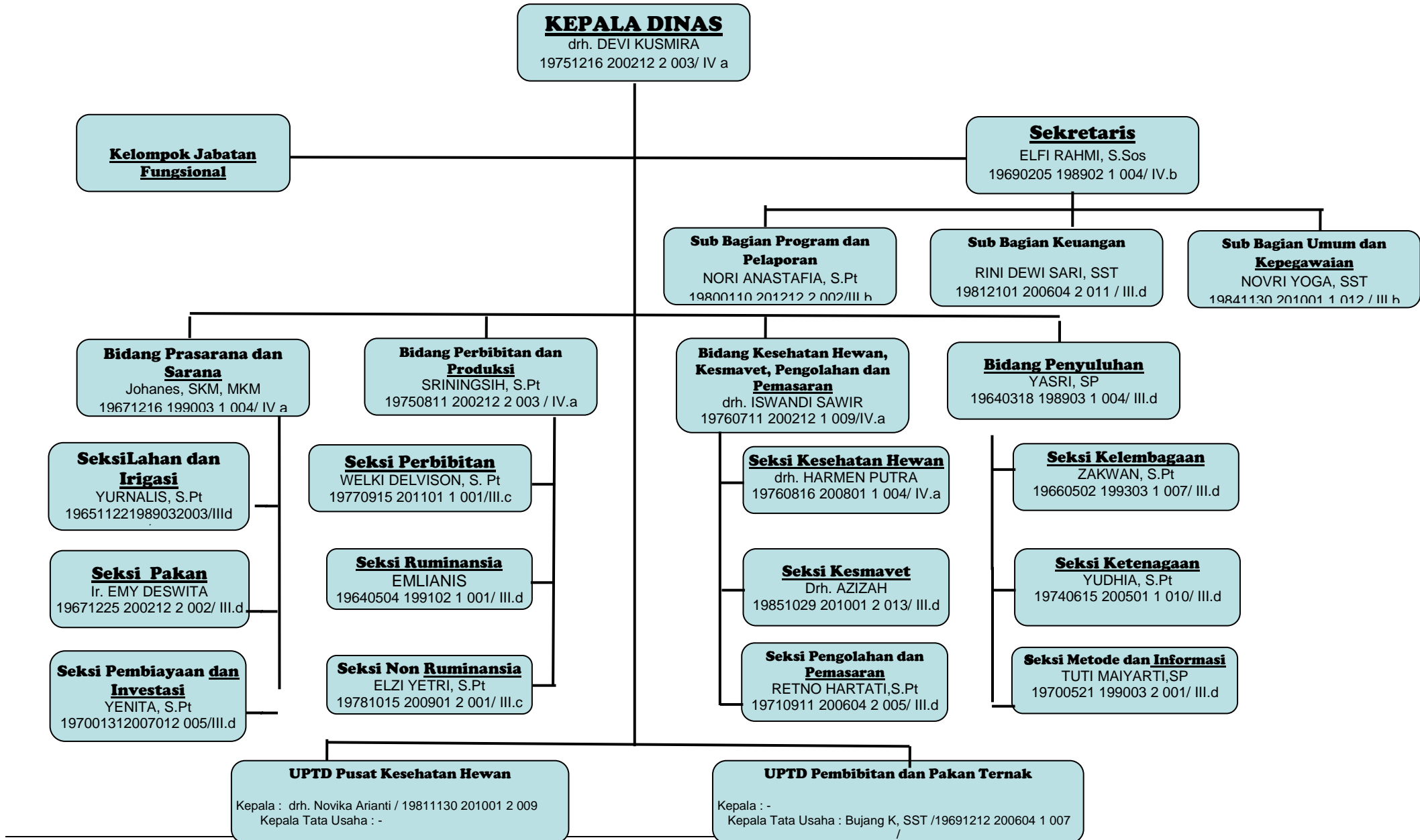
**2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi**

**2.1.1 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai Struktur Organisasi Tata Kerja sebagai berikut :

SOTK DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021



### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima puluh nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diuraikan kedudukan,tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kotasebagai berikut:

#### **a. Kedudukan .**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **b. Tugas Pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan.

#### **c. Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian.

- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Peternakan.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian sub bidang peternakan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pertanian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pertanian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
    - 1) Seksi Lahan dan Irigasi;
    - 2) Seksi Pakan;
    - 3) Seksi Pembiayaan dan Investasi.
  - d. Bidang Perbibitan dan Produksi, terdiri dari:
    - 1) Seksi Perbibitan;
    - 2) Seksi Ruminansia;
    - 3) Seksi Non Ruminansia.

- e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari:
    - 1) Seksi Kesehatan Hewan;
    - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
    - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
  - f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Kelembagaan;
    - 2) Seksi Ketenagaan;
    - 3) Seksi Metode dan Informasi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Paragraf 1 Tugas

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Peternakan;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pertanian;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbibitan dan Produksi, Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Peternakan;
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pertanian;
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang Pertanian;
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pertanian;
- h. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang Pertanian;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang Pertanian;
- j. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas



- k. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- l. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- n. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas.
- o. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas.
- p. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- r. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- s. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan;
  - b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
  - c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;

- d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- h. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- i. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas dilingkup Dinas;
- j. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- k. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi dilingkup Dinas;
- l. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- m. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- n. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;

- o. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- p. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- r. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- t. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- u. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- v. mengelola perencanaan dan program Dinas;
- w. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- x. mengkoordinasikan tugas-tugas internal dilingkup Dinas;
- y. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga  
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Prasarana dan Sarana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan perumusan, penetapan kebijakan operasional program lahan dan irigasi
  - b. Penyiapan perumusan, penetapan kebijakan operasional pakan ternak
  - c. Penyiapan perumusan, penetapan kebijakan operasional program pembiayaan dan investasi.
  - d. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang Prasarana dan Sarana;

- e. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur peternakan;
- f. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi peternakan
- g. Pengendalian, pengawasan peredaran dan penyediaan pakan ternak, benih / bibit hijauan pakan ternak
- h. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan alat dan mesin Peternakan;
- i. Pemberian bimbingan pembiayaan peternakan;
- j. Pemberian fasilitasi perizinan peternakan dan kesehatan hewan
- k. Pemberian fasilitasi investasi peternakan;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana peternakan ;dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3). Uraian Tugas Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas
- c. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang Lahan dan Irigasi;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang Pakan Ternak;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang Pembiayaan dan Investasi;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinir program bidang Prasarana dan Sarana
- g. Melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan fasilitasi bidang Prasarana dan Sarana
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Bagian keempat  
 BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI

Pasal 15

(1) Bidang Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perbibitan dan produksi yang

menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perbibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan, perumusan, penetapan kebijakan operasional Perbibitan dan Produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perbibitan dan produksi;
  - c. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang Perbibitan dan Produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
  - d. Pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan identifikasi mutu, peredaran, penyediaan dan pendistribusian benih/bibit ternak dan sarana perbibitan ternak;
  - e. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penerapan pemanfaatan penggunaan teknologi di bidang perbibitan dan produksi;
  - f. Pengkoordinasian, pengendalian, penanggulangan bencana dan dampak usaha peternakan dengan instansi dan stakeholder terkait lainnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Bidang Perbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan di bidang benih/bibit dan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
  - b. menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang;
  - c. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak
  - d. mengelola sumber daya genetik ternak dan hewan;
  - e. mengendalikan, mengawasi mutu, peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak ruminansia dan non ruminansia;
  - f. menyediakan sarana teknis perbibitan;
  - g. memfasilitasi, mengkoordinir, membina dan mengevaluasi petugas teknis bidang perbibitan dan produksi;

- h. memberikan, bimbingan, pembinaan dan pengawasan penyebaran ternak bantuan pemerintah dan pihak ketiga lainnya;
- i. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi produksi ternak;
- j. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi penerapan pemanfaatan penggunaan teknologi di bidang perbibitan dan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- k. mengkoordinasikan dampak usaha peternakan dengan instansi dan stakeholder terkait lainnya;
- l. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana sub sektor peternakan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET,  
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

Pasal 20

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan, dan Pemberian Bimbingan Teknis, serta Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyiapan, perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - b. Perumusan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan;
  - c. Penjaminan kesehatan hewan dan pengolahan bahan pangan asal hewan;

- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengawasan Obat Hewan, Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa *medic veteriner*;
- f. Pelaksanaan Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- g. Pelaksanaan Pemberian izin/rekomendasi di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan Hasil Peternakan dan Pemasaran;
- h. Pelaksanaan koordinasi hubungan kerja dengan Instansi dan stakeholder terkait bidang kesehatan hewan dan Kesmavet;
- i. Pelaksanaan Pemberian bimbingan pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Melaksanakan kebijakan Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- c. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- d. Melaksanakan Penjaminan kesehatan hewan dan pengolahan bahan pangan asal hewan;
- e. Melaksanakan Pengawasan Obat Hewan;
- f. Melaksanakan Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- g. Melaksanakan Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa *medic veteriner*;

- h. Melaksanakan Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. Melaksanakan Pemberian izin/rekomendasi di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan Hasil Peternakan dan Pemasaran;
- j. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan Instansi dan stakeholder terkait.
- k. Melaksanakan Pemberian bimbingan pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan ;
- l. Melaksanakan Pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan;
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian keenam  
BIDANG PENYULUHAN

Pasal 25

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan penyusunan kebijakandan programa penyuluhan peternakan dan informasi;
  - b. Perumusan penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja Bidang Penyuluhan Peternakan;
  - c. Pelaksanaan penyuluhan peternakan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, metode penyuluhan dan informasi peternakan dan kesehatan hewan;
  - d. Pelaksanaan Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama ;



- e. Pelaksanaan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan dan informasi peternakan dan kesehatan hewan.
- f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, validasi dan penyajian data peternakan dan kesehatan hewan
- g. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama ;
- h. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- i. Pembinaan, pemantauan, pemberdayaan dan evaluasi di bidang penyuluhan peternakan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang Penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Melaksanakan penyusunan kebijakandan programa penyuluhan peternakan dan informasi;
- e. Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran bidang Penyuluhan;
- f. Melaksanakan penyuluhan peternakan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, metode penyuluhan dan informasi peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Melaksanakan Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama ;
- h. Mengelola kelembagaan, ketenagaan dan informasi peternakan dan kesehatan hewan.
- i. Melaksanakan Pengumpulan, pengolahan, validasi dan penyajian data peternakan dan kesehatan hewan

- j. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama ;
- k. Meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil,swadaya dan swasta;
- l. Melaksanakan Pembinaan, pemantauan, pemberdayaan dan evaluasi di bidang penyuluhan peternakan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 31

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 85 orang baik yang berada di kantor Kabupaten maupun yang berada di kecamatan/lapangan (data tahun 2021), dengan rincian sebagai berikut:

1. PNS yang berada pada kantor 36 orang dan THL 9 orang sehingga berjumlah 45 orang
2. PNS yang berada di Kecamatan (Medis/Paramedis/Petugas IB/PKB) 37 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 3 orang sehingga berjumlah total 40 orang.

Tabel II.1 : Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Tingkat golongan.

No.	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	15	19,74
3	Golongan III	54	71,05
4	Golongan IV	7	9,21

Tabel II.2 : Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	1	1,18
2	SLTP	0	0
3	SLTA	20	23,55
4	D III/ Sarjana Muda	9	10,59
5	Starata I / S1	44	51,77
6	D4	10	11,76
7	Starata II	1	1,18

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber daya manusia (aparatur) paling banyak memiliki latar belakang pendidikan strata satu (S-1) yakni sebanyak 51,77% dan latar belakang SLTA memiliki presentase 23,55% atau kedua paling besar, dan strata pendidikan D-4 sebanyak 11,76%, pendidikan D-3 sebanyak 10,59%, dan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 1,18% serta latar belakang pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 1,18%. Dapat disimpulkan bahwa kapasitas SDM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah memadai, namun untuk kuantitas belum memadai atau belum terpenuhi semua jabatan dengan optimal.

### 2.2.2 Sarana dan Prasana

Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
I	TANAH	9
II	GEDUNG DAN BANGUNAN	1
III	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	84
	<i>a. Kendaraan Dinas Roda 4</i>	6
	<i>b. Kendaraan Dinas Roda 2</i>	78
IV	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2
	<i>1. Alat Ukur Universal</i>	1
	<i>2. Alat Ukur Lainnya</i>	1
V	ALAT PERTANIAN	170
	<b>1. Alat Pengolahan</b>	<b>165</b>
	<i>a. Alat-Alat Peternakan</i>	<b>154</b>
	- Borduzzo Tang	4
	- Cap Bakar	1
	- Container	21
	- Insemination Gun	6
	- Termos A.I	22
	- Dehamer (Pemotong Tanduk)	1

	- Meson Penetas Telur	4
	<b>b. Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian</b>	<b>6</b>
	- Rak-Rak Penyimpanan	6
	<b>c. Alat Processing</b>	<b>4</b>
	<b>2. Alat Pemeliharaan Tanaman</b>	
	<b>a. Alat Pemeliharaan</b>	<b>3</b>
	- Penyemprot Mesin (Power Spayer)	2
	- Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1
	<b>b. Alat Penyimpanan</b>	<b>2</b>
	- Rak Penyimpanan	2
<b>VI</b>	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>493</b>
	<b>1. Alat Kantor</b>	<b>20</b>
	- Meja Komputer	6
	- Mesin Ketik	14
	<b>2. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor</b>	
	- Rak Besi/ Metal	1
	- Rak KAYu	8
	- Filling Besi	17
	- Brand Kas	1
	- Kardek Kayu	3
	- Lemari Kaca	15
	- Lemari Kayu	3
	<b>3. Alat Kantor Kainnya</b>	
	- Papan Nama Instansi	1
	- Papan Pengumuman	5
	- White Board	5
	- Panel Pameran	3
	- Genset	2
	- Mesin Pompa Air	1
	- Bendera Merah Putih	2
	<b>4. Alat Rumah Tangga</b>	

	a. Meubiler	
	- Lemari Kayu	1
	- Tempat Tidur Besi/Metal	5
	- Kursi Tamu	10
	- Kursi Biasa	5
	- Kursi Lipat	35
	- Tenda	4
	b. Alat Pengukur Waktu	
	- Jam Elektronik	3
	c. Alat Pembersih	
	- Mesin Potong Rumput	3
	d. Alat Pendingin	
	- Lemari Es	7
	- AC Unit	6
	e. Alat Dapur	
	- Dispenser	1
	f. Alat Rumah Tangga Lainnya	
	- Televisi	4
	- Loudspeaker	1
	- Compact Disc	2
	- Unit Power Supply	12
	- Timbangan Badan	1
	- Tangga Alumanium	1
	- Lambang Instansi	18
	- Tandon Air	1
	- Receiver + Attachment	1
	g. Alat Pemadam Kebakaran	1
<b>VII</b>	<b>Peralatan Kantor</b>	
	- Komputer	10
	- Laptop	22
	- Note Book	4

	- IPAD	1
	Peralatan Komputer	
	- Hard Disk	6
	- Mainframe	1
	Peralatan Mini Komputer	
	- Scanner	1
	- Charger Laptop	2
	Peralatan Personal Komputer	
	- Printer	39
<b>VIII</b>	<b>Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	
	<b>1. Meja Kerja Pejabat</b>	
	- Meja Kerja Menteri	6
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	10
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	27
	- Meja Tamu Ruangan Biasa	1
	- Meja Rapat Pejabat (Lingkar)	12
	<b>2. Kursi Kerja Pejabat</b>	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	25
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja	3
	<b>3. Lemari dan Arsip Pejabat</b>	
	- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1
	- Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1
	- Lemari Arsip untuk Arsip Dokumen	17
<b>IX</b>	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	
	<b>a. Alat studio</b>	

	- Camera + Attachment	7
	- Proyektor + Attachment	9
	- Microphone/Wireless mic	7
	- Handycam	2
	- Layar Proyektor	6
	- Timbangan Hewan	1
	<b>b. Alat Komunikasi</b>	
	- Telephone	4
	- Microphone	1
	- Loudspeaker	1
	- Telephone (PABX)	1
	- Faxmili	1
	- Wireless Amplifier	9
<b>X</b>	<b>Alat-Alat Kedokteran</b>	
	<b>a. Alat Kedokteran</b>	
	- Alat Kedokteran Umum	14
	1. Sterilisator	1
	2. Stetoscope	7
	3. Metal Catheter	2
	4. Instrument Kabinet	1
	- Alat Kedokteran Gigi	
	1. Minor Surgical Set	1
	- Alat Kedokteran Bedah	
	1. Minor Surgeri Set	1
	2. Mayor Surgeri Set	1
	- Poliklinik Set	
	1. Mayor Hegards Holder	1
	2. Tabung Oksigen	1
	3. Mini surgery	2
	4. Bowi Solution Tas Kulit	1



<b>XI</b>	<b>Alat-Alat Laboratorium</b>	
	<b>a. Alat Laboratorium Umum</b>	
	- Centrifuge	5
	- Krous Glass	1
	- Microscope	7
	- Vacuum Pump	1
	- Cawan Proceline	4
	- Bak Fiberglass	4
	<b>b. Alat Laboratorium Kedokteran</b>	
	- Test Tube Rack	4
	<b>c. Laboratorium Kearsipan</b>	
	- Pipet Ukur	4
	<b>d. Laboratorium Hematologi</b>	
	- HB Meter	2
	<b>e. Alat Peraga/Prakter Sekolah</b>	
	- Pipet Asap	1

Catatan: Keadaan s.d 31 Desember 2020

Untuk kendaraan dinas dan operasional baik kendaraan roda dua (2) maupun untuk kendaraan roda empat (4) masih belum terpenuhi kebutuhan dinas untuk pejabat dan petugas.

Tabel Jumlah Kelompok Yang Terdaftar

No	Jumlah Kelompok								Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	42	41	53	17	30	26	29	23	

### 2.2.2 Sumber Daya Peternakan

#### I. Populasi Ternak tahun 2017-2020

Populasi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari data populasi ternak berikut ini:

Tabel : Populasi Ternak di Kab. Lima Puluh Kota Tabun 2017 s/d 2020

No.	Komoditi	Populasi Th 2017	Populasi Th 2018	Populasi Th 2019	Populasi Th 2020	Ket.
1.	Sapi Perah	47	47	39	42	
2.	Sapi Potong	36.043	39.689	42.704	43.212	
3.	Kerbau	7.937	12.327	12.329	10.452	
4.	Kuda	75	82	95	84	
5.	Kambing	26.335	27.939	30.313	29.449	
6.	Ayam Buras	318.167	328.578	348.701	359.069	
7.	Ayam Petelur	6.349.407	7.450.450	7.474.471	7.331.287	
8.	Ayam Pedaging	14.947.100	15.116.500	16.468.528	12.414.843	
9.	Itik	15.923	132.088	139.756	144.256	
10.	Burung Puyuh	643.290	623.819	656.316	644.157	

Meningkatnya populasi dan produksi ternak yang ditandai dengan peningkatan jumlah populasi dan produksi komoditi yang ada di peternakan, pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat untuk beternak makin meningkat ditandai dengan PDRB sub sektor peternakan juga meningkat. Populasi juga bisa meningkat dengan adanya keberhasilan pelaksanaan kegiatan IB, dimana realisasi diatas target ditambah lagi dengan ternak bantuan baik ternak besar maupun unggas yang mengakibatkan populasi ternak bertambah secara umum. Apabila populasi meningkat dan diiringi dengan pengawasan status kesehatan hewan yang maksimal dengan sendirinya pendapat peternak meningkat dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota juga meningkat kesejahteraannya sejalan dengan tujuan dari keberadaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian juga dengan ternak unggas, populasi ayam petelur dibandingkan tahun sebelumnya meningkat hal ini disebabkan karena peternak dengan populasi besar atau skala besar tambah berkembang dalam usahanya dimana pola peternak skala besar tersebut lebih efisien dalam pengelolaan pakan dan pemanfaatan tenaga kerja sehingga usahanya makin berkembang yang disertai dengan peningkatan populasi ternak ayam ras sehingga produksi telur pun akan meningkat seiring dengan meningkatnya populasi.

## II. Produksi telur 2017-2020

**Peningkatan produksi ternak yang berkualitas** juga merupakan indikator pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel . Produksi Komoditi Peternakan Tahun 2017-2020

No.	Komoditi	Produksi Th 2017	Produksi Th 2018	Produksi Th 2019	Produksi Th 2020	Ket
1.	Telur Ayam Buras	203.785,68	210.454,48	223.343	223.343	Kg
2.	Telur Ayam Petelur	48.830.567,97	57.319.609,5	57.418.459	57.418.459	Kg
3.	Telur Itik	667.408,32	725.163,12	767.259	767.259	Kg
4.	Telur Burung Puyuh	728.356,86	723.724,48	754.016	754.016	Kg
5.	Daging Sapi Potong	1.120.944	1.053.184	1.091.904	1.091.904	Kg
6.	Daging Kerbau	161.548,75	176.467,5	183.288	183.288	Kg
7.	Daging Kambing	73.319,4	90.962,99	74.471	74.471	Kg
8.	Daging Ayam Buras	384.393,87	397.514	422.327	422.327	Kg
9.	Daging Ayam Petelur	4.627.269,92	5.433.233	5.451.402	5.451.402	Kg
10.	Daging Ayam Pedaging	16.003.879,68	16.176.855	17.549.235	17.549.235	Kg
11.	Daging Itik	71.481,98	77.668	82.176	82.176	Kg
12.	Daging Burung Puyuh	62.008,65	60.134	62.698	62.698	Kg
13.	Susu Sapi perah	71.910	71.910	59.670	59.670	Kg
14.	Susu Kerbau	114.768	123.265	123.285	123.285	Kg

Ctt: 1 kg telur ayam buras= 25 btr, 1 kg telur ayam ras=16 btr, 1 kg telur itik = 15 btr

Produksi komoditi peternakan secara umum juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan populasi.

III. Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013 s.d 2017

Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2017 s.d tahun 2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	JENIS TERNAK	Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak per KK				
		2017	2018	2019	2020	Ket
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Sapi Potong	17.922	18.312	18.385	18.538	
2.	Sapi Perah	17	18	11	11	
3.	Kerbau	4.797	5.041	5.267	5.292	
4.	Kuda	44	46	42	29	
5.	Kambing	4.710	5.143	5.861	6.064	
6.	Ayam Buras	26.779	27.374	28.090	28.632	
7.	Ayam Ras Petelur	446	487	485	471	
8.	Ayam Ras Pedaging	513	550	484	451	
9.	Itik	3.980	4.335	3.967	3.889	
10.	Burung Puyuh	395	369	316	245	

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah berganti nomenklatur beberapa kali, yakni tahun 2006 Dinas Peternakan bergabung dengan Dinas Perikanan, sehingga nomenklatur menjadi Dinas Peternakan dan Perikanan, dan pada tahun 2007 Dinas Peternakan berdiri sendiri sehingga menjadi Dinas Peternakan. Selanjutnya pada tahun 2011 nomenklaturnya menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan periode sebelumnya, Dinas Peternakan mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pada OPD, seperti tabel Tabel T-C.23 dibawah ini :

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya populasi ternak (ekor) :																		
a	Sapi Perah				23	47	47	48	49	28	47	47	39	42					
b	Sapi Potong				35.852	36.043	39.689	40.483	41.293	35.494	36.043	39.689	42.710	45.071	100	99,36	91,41	92,34	87,67
c	Kerbau				13.427	11.477	12.327	12.574	12.825	13.448	11.478	12.327	12.329	9.992	100	99,81	96,15	103,99	105,77
d	Kambing				24.436	26.335	27.939	28.498	29.068	25.042	26.334	27.939	30.313	29.379	102,16	76,5	69,75	74,35	73,31
e	Itik				192.318	121.568	132.088	134.730	137.425	190.705	384.137	132.088	39.756	145.232	161,09	84,3	87,23	94,21	90,37
f	Ayam buras				445.540	318.167	328.578	335.150	341.853	421.736	318.162	328.579	352.700	385.790	99,03	59,19	43,74	38,68	38,16
g	Ayam Ras Petelur				5.213.216	6.349.407	7.450.450	7.599.459	7.751.448	4.982.471	6.349.407	7.444.456	7.474.471	7.748.600	95,76	94,93	95,05	91,28	92,07
h	Ayam Ras Pedaging				5.608.590	14.947.100	19.116.500	19.498.830	19.888.807	7.338.229	14.242.005	14.358.458	16.468.528	12.848.250	140,26	139,5	84,96	95,18	117,91
i	Puyuh				1.040.799	642.290	623.819	636.295	649.021	972.675	642.290	623.819	656.316	680.038	91,92	134,92	126,82	126,26	111,95
2	Meningkatnya produktifitas ternak :										-	-	-	-					
a	Daging sapi (ton)				1.009.063	1.120.944,00	1.053.184,00	1.074.247,68	1.095.732,63	1.025.354	1.120.944	1.053.184	1.091.904	1.298.271	135,68	136,31	103,56	91,35	87,44
b	Daging Kerbau (ton)				191.420	161.548,75	176.548,50	180.079,47	183.681,05	197.353,75	161.548,75	176.467,50	183,287,5	99,92	406,39	442,9	312,65	251,19	219,28
c	Daging Kambing (ton)				41.715	73.319,40	90.962,99	92.782,24	94.637,89	29.919,78	73.319,40	90.962,99	74.470,60	37.895,00	151,84	127,06	53,25	39,39	33,49
d	Telur itik (kg)				1.057.055	667.408,32	725.163,12	739.666,38	754.459,71	1.046.970,50	667.408,32	725.163,12	767.259,30	844.488,00	100	84,97	87,93	94,96	9,75
e	Telur ayam buras (kg)				285.368	203.785,68	210.454,48	214.663,57	218.956,84	270.121,90	203.785,68	210.454,48	223.342,70	247.098,00	110,75	67,19	49,79	48,66	82,6
f	Telur ayam ras (kg)				40.193.897	48.830.567,97	57.319.609,50	58.466.001,69	59.635.321,72	38.223.751,40	48.830.567,97	57.319.609,50	57.418.459,40	59.741.706,00	100,12	97,43	97,55	93,66	8,97

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum pada tabel T-C.23, selanjutnya dapat disajikan evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja sebagai berikut :

### **1. Meningkatnya populasi ternak**

Kegiatan yang mendukung untuk meningkatnya populasi ternak antara lain :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
- b. Pembibitan dan perawatan ternak
- c. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
- d. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
- e. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
- f. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
- g. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
- h. Peningkatan Kelembagaan Tani
- i. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

Meningkatnya populasi ternak baik ternak besar maupun ternak kecil merupakan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun. Berdasarkan tabel T-C.23 dapat dilihat dalam jangka waktu 5 tahun periode Renstra sebelumnya perkembangan populasi ternak sapi, kerbau ayam ras petelur, ayam ras pedaging serta ternak puyuh pada umumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan peternak merasakan adanya peningkatan ekonomi dengan menjalankan usaha tersebut. Disamping dengan adanya program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mendukung dan mengawasi perkembangan ternak tersebut, mulai dari mutu bibit, mutu pakan dan pakan alternatif, pemberian vaksin sampai ke pengawasan terhadap kesehatan ternak sehingga populasi ternak meningkat. Sementara untuk ternak kambing, itik dan ayam buras mengalami fluktuasi populasi disebabkan keinginan dan minat peternak yang berkurang seiring dengan keuntungan yang diperoleh oleh peternak itu sendiri, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan berperan dalam hal memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap

kelompok atau pun perorangan peternak yang berusaha dibidang ternak itik, ayam buras dan kambing untuk memberikan motivasi kepada peternak.

## **2. Meningkatnya Produktifitas Ternak**

Kegiatan yang mendukung untuk meningkatnya produktifitas ternak antara lain :

- a. Pendataan masalah peternakan
- b. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
- c. Pengembangan agribisnis
- d. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
- e. Promosi atas hasil peternakan unggulan daerah
- f. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Meningkatnya produktifitas ternak juga merupakan tujuan dan sasaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana produktifitas ternak ini erat kaitannya dengan populasi ternak yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan produktifitas ternak juga didukung dengan adanya program dan kegiatan yang ada di dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk untuk mempromosikan produk peternakan yang ada atau berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu ajang untuk mempromosikan produk peternakan yang ada di Lima Puluh Kota adalah adanya agenda rutin tahunan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Live Stock Expo dan Bulan Bakti Peternakan dengan menampilkan produk peternakan seprovinsi Sumatera Barat. Pada ajang kegiatan dimaksud Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2011, 2014 dan 2015 Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat juara umum.

Seiring dengan meningkatnya populasi ternak juga berkaitan dengan produktifitas ternak yang menurun pada ternak itik, ayam buras dan ternak kambing. Untuk meningkatkan produktifitas ternak juga didukung dengan pengadaan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh peternaka dan pelaku dibidang peternakan untuk meningkatkan produktifitas dan mampu bersaing dipasaran.

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut diatas perlu dilakukan upaya-upaya strategis antara lain diperlukan persiapan secara

menyeluruh, bukan saja penyiapan sarana dan prasarana, namun yang paling penting adalah sumber daya manusianya yang dapat menguasai teknologi dan mempunyai moral dan etika tinggi terhadap penggunaan teknologi ini. Selain itu juga diperlukan target dari penerapan teknologi ini, peternakan rakyat yang hanya mempunyai ternak dengan jumlah kecil, usaha peternakan atau pemerintah yang akan membangun pusat usaha ternak sapi, sehingga pengembangan usaha peternakan dapat dilakukan secara terpadu.

Capaian kinerja anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama kurun waktu Tahun 2011-2015 seperti terlihat pada Tabel T.C-24

Anggaran belanja selama 5 tahun menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2012, 2013 dan 2014 yang dapat dilihat dari ratio antara realisasi dan anggaran yang mencapai 92,44 – 115,24%, sementara itu pada tahun 2011 terdapat ratio sebesar 69,04% dan 62,73% pada tahun 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel T.C-24.



Tabel T-C.24

## Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

## Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	441.856.500	604.133.900	598.216.000	722.581.380	468.093.968	431.395.513	594.453.257	526.460.338	698.391.236	453.422.328	98	98	88	97	97	566.976.350	540.824.534
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	424.562.700	250.576.000	173.800.000	190.000.000	112.476.520	421.665.554	250.177.838	157.599.163	177.902.153	112.345.900	99	100	91	94	100	230.283.044	223.938.122
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.650.000			43.000.000		36.650.000			43.000.000		100					15.930.000	15.930.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	17.790.000	6.180.000	2.805.000	13.000.000		6.680.000	6.180.000	1.830.000	595.000		38	100	65	5		7.955.000	3.057.000
5	Program Peningkatan, pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85.638.000	83.593.200	45.965.000	29.883.000	38.100.000	84.783.000	82.438.200	45.039.000	42.238.000	38.097.000	99	99	98	141	100	56.635.840	58.519.040
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	75.813.000	51.460.000	18.206.800		40.485.850	75.769.000	51.447.500	18.206.000	29.880.500	40.485.000	100	100	100			37.193.130	43.157.600
7	Program Pengembangan Data/ informasi/ Statistik Daerah	90.150.000					89.715.000					100					18.030.000	17.943.000
8	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan			30.197.500	34.823.000				30.195.000	34.823.000								
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	210.394.750	274.970.300	119.240.100	123.192.900	85.509.100	205.220.950	272.718.500	116.155.100	121.276.900	85.061.450	98	99	97	98	99	162.661.430	160.086.580
10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	982.801.450	827.893.900	1.069.824.300	849.921.600	488.402.620	969.901.700	827.709.600	1.029.776.400	600.618.350	485.233.020	99	100	96	71	99	843.768.774	782.647.814
11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	490.507.125	216.050.900	139.809.200	139.350.000	58.339.700	484.126.100	216.050.900	137.309.200	139.350.000	58.298.000	99	100	98	100	100	208.811.385	207.026.840
12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	77.496.600	123.113.700	46.717.000	38.187.520	12.659.550	77.386.600	123.113.700	46.713.000	38.187.520	12.659.550	100	100	100	100	100	59.634.874	59.612.074
	JUMLAH	2.933.660.125	2.437.971.900	2.244.780.900	2.183.939.400	1.304.067.308	2.883.293.417	2.424.289.495	2.109.283.201	1.926.262.659	1.285.602.248						2.207.879.827	2.112.742.604

Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama tahun Renstra sebelumnya dimana indikatornya adalah :

- Terlaksananya jasa administrasi kantor tepat waktu
- Lancarnya administrasi keuangan
- Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman
- Terpenuhinya kebutuhan ATK
- Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- Tersedianya makan dan minum
- Lancarnya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
- Terpenuhinya kendaraan dinas operasional
- Terpenuhinya kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan rutin dan berkala mobil jabatan
- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
- Terpeliharanya gedung kantor
- Tersedianya pakaian dinas aparatur
- Meningkatnya kualitas SDM aparatur melalui diklat
- Tersedianya laporan monev dan bahan perencanaan
- Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Dari keseluruhan indikator untuk kegiatan rutin jika dirata-ratakan yaitu sebesar 100 % artinya semua kegiatan rutin terlaksana dengan baik dan indicator tercapai baik fisik maupun realisasi keuangan.

### 2.3.2 Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak (SDM Peternak)

Sasaran strategisnya yaitu meningkatkan kelembagaan tani ternak dan meningkatnya SDM kelompok tani ternak. Dari tabel T-C.24 dapat dilihat kegiatan peningkatan kelembagaan ini target nya menurun disebabkan karena anggaran juga semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh ketersediaan dana yang sedikit dibandingkan dana yang ditargetkan pada Rensrtra, namun capaian fisik kegiatan tidak berkurang. Hal ini dapat dilihat dari realisasi jumlah kelompok yang dibina setiap tahunnya meningkat dari 50 kelompok yang ditetapkan pada target indicator DPA realisasi 70 kelompok atau 140 %. Pencapaian yang melebihi target ini disebabkan oleh besarnya animo masyarakat untuk berkelompok demi meningkatnya pendapatan petani peternak disektor peternakan.

### 2.3.3 Berkurangnya Permasalahan Penyakit Menular dan Penyakit yang disebabkan oleh Hewan Liar dan Ternak.

Indikator utamanya adalah :

- Tingkat pendeteksian penyakit secara dini
- Tingkat pengawasan obat hewan oleh Depo/toko obat hewan
- Kualitas pelayanan kesehatan hewan
- Tingkat penurunan kasus penyakit menular dan penyakit yang disebabkan oleh hewan liar dan ternak (Zoonosis)
- Tingkat pengawasan perdagangan hewan / ternak antar daerah dan pemotongan hewan
- Jumlah dan mutu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan
- Tingkat pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemic.

Dari tabel T-C.24 dapat dilihat bahwa pada tahun dana yang tersedia atau realisasi sedikit dibandingkan dengan dana yang ditargetkan di Renstra. Hal ini menyebabkan turunnya realisasi dari target tahun renstra juga terjadi penurunan rasio capaian, hal ini juga disebabkan oleh sedikitnya dana yang tersedia dibandingkan dana yang ditargetkan pada tahun renstra namun apabila dirata-ratakan pada indicator tersebut diatas yaitu 100,28 %. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategi dan indicator utama sudah tercapai baik realisasi fisik maupun realisasi keuangannya.

#### 2.3.4 Meningkatnya populasi dan produksi ternak

Indikator utamanya adalah :

- Ketersediaan sarana dan prasarana IB dan ET
- Realisasi IB (I, II, III) straw
- Angka kebuntingan ternak besar
- Angka kelahiran anak hasil IB
- Meningkatnya populasi ternak sapi
- Meningkatnya populasi ternak kerbau
- Meningkatnya populasi ternak kambing
- Meningkatnya populasi ternak unggas
- Meningkatnya produksi daging
- Meningkatnya produksi telur
- Jumlah ketersediaan bahan pangan local untuk menunjang produksi ternak
- Jumlah pemeriksaan bahan pakan ternak yang beredar
- Jumlah pemotongan ternak
- Pendistribusian ternak kepada masyarakat / kelompok

Dari tabel T-C.24 dapat dilihat pada 5 indikator yang sasarannya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak rata-rata rasio capaiannya meningkat, dimana seluruh indicator utama terlaksana sesuai realisasi anggaran bahkan secara fisik ada yang melebihi 100 %.. Namun rasio capaian setiap tahunnya tidak stabil, hal ini erat kaitannya dengan realisasi anggaran pada tahun yang bersangkutan dengan dana yang ditargetkan pada tahun renstra berjalan.

#### 2.3.5 Terlaksananya promosi hasil peternakan dan produk olahan hasil

Ternak.

Sasaran strategisnya yaitu berkembangnya basis perekonomian daerah yang terspesialisasi berdasarkan kompetensi dan potensi masing-masing daerah. Berdasarkan tabel T-C.24 diatas banyak indicator yang tidak terlaksana, disebabkan ada sebagian kegiatan yang teranggarkan di renstra tapi tidak ada capaian realisasi, hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan dana dan prioritas kegiatan. Dari 9 (Sembilan) buah indikator pada uraian ditabel T-C.24 hanya kegiatan

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah yang terlaksana. Adapun indicator dari kegiatan promosi atas hasil produksi unggulan daerah adalah :

- Terlaksananya promosi hasil peternakan dan produk hasil peternakan
  - Terlaksananya promosi produk hasil peternakan melalui media massa
  - Terlaksananya promosi produk hasil peternakan melalui leaflet
  - Meningkatnya pembinaan teknis usaha peternakan kepada pelaku pengolah hasil peternakan.
  - Penguatan modal usaha di pemerintah.
  - Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
- Kesemua indicator tersebut telah terlaksana dengan optimal dengan realisasi dana dan realisasi fisik cukup tinggi.

2.3.6 Terfasilitasinya pengembangan dan diversifikasi teknologi dibidang peternakan dan pengolahan hasil peternakan dan meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna serta meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna.

Sasaran strategisnya yaitu berkembangnya basis perekonomian daerah yang terspesialisasikan berdasarkan kompetensi dan potensi masing-masing daerah.

Dari Tabel T-C.23 indikator tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna target dan realisasi capaian turun dari anggaran yang ditargetkan di Renstra, hal ini disebabkan realisasi capaian lebih rendah anggarannya renstra dibanding dengan anggaran yang ditargetkan setiap tahunnya, namun realisasi fisiknya 100% dimana indicator pada DPA terlaksana setiap tahunnya 100%, dapat dilihat jumlah kelompok yang diberikan bantuan teknologi tiap tahunnya bertambah.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh kota mencakup penetapan tujuan, sasaran dan strategi. Renstra ini untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dinas yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal serta RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berfikir strategis dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi Sumatera Barat serta hasil analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan bagaimana pembangunan sektor peternakan bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan sektor peternakan memberikan sumbangan terhadap efek rumah kaca yang dihasilkan dari limbah ternak.

**Tabel Persandingan Program dan Kegiatan Prioritas**

No.	Prog. Prioritas Renstra Kementerian Pertanian Ditjen Peternakan	Prog. Prioritas Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar	Prog. Prioritas Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota	Ket.
1.	Fungsi Perbibitan	Fungsi Kesehatan Hewan & Kesehatan Masy Veteriner	Fungsi Perbibitan dan Produksi	
2.	Fungsi Budidaya Ternak	Fungsi Perbibitan	Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesmavet	
3.	Fungsi Pakan Ternak	Fungsi Budidaya	Fungsi Pemasaran Produk Peternakan dan Sarana dan Prsarana	
4.	Fungsi Kesehatan Hewan	Fungsi Pakan	Fungsi SDM	
5.	Fungsi Kesekretariatan	Fungsi SDM	Fungsi Kesekretariatan	
6.		Bidang Bina Usaha Peternakan		

Berdasarkan analisis Renstra kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi bidang peternakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Fungsi Perbibitan dan produksi**

Benih/bibit ternak berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan ternak. Hal tersebut terkait dengan peningkatan populasi dan produktivitas ternak dalam penyediaan daging dan susu.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, ketersediaan benih/bibit ternak menjadi tanggung jawab Bidang Perbibitan dan Produksi, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Tuah Sakato, Balai Pembibitan / Pengembangan dan Makanan Ternak.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi perbibitan :

**a. Tantangan**

- 1) Terbatasnya bibit ternak berkualitas yang sesuai dengan standar bibit;
- 2) Tingginya pemotongan betina produktif;
- 3) Belum dilaksanakannya good breeding practice.

- 4) Penyakit hewan menular strategis;
- 5) Perubahan cuaca ekstrim.
- 6) Panjangnya calving interval pada ternak betina produktif.
- 7) Rendahnya produksi ternak.
- 8) Konsekwensi dan komitmen petugas IB
- 9) Sarana dan prasarana yang kurang memadai

b. Peluang

- 1) Tingginya permintaan bibit ternak berkualitas;
- 2) Meningkatnya usaha pembibitan sapi lokal;
- 3) Tingginya permintaan semen beku di kabupaten Lima Puluh Kota;
- 4) Potensi pasar
- 5) Berkembangnya usaha produk peternakan
- 6) Meningkatkan SDM petugas IB
- 7) Meningkatnya sarana dan prasarana IB

## **2. Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk wilayah yang rawan tertular penyakit dari wilayah Provinsi lain karena merupakan daerah lalu lintas ternak antar Provinsi. Kondisi tersebut mengandung konsekuensi tindakan pencegahan dini terhadap kemungkinan timbulnya penyakit menular dari wilayah lain. Beberapa jenis penyakit hewan menular (PHM) yang perlu diwaspadai antara lain rabies, anthrax, avian influenza (AI), dan brucellosis serta Jembrana.

Penyakit hewan menular yang perlu mendapatkan prioritas pengendalian dan pemberantasan adalah avian influenza (AI), SE dan Jembrana.

Peranan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dalam mewujudkan keamanan pangan ke depan khususnya penyediaan Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) serta produk hewan sangatlah penting. Perlindungan konsumen akan pangan asal hewan yang ASUH tidak lagi sebagai tuntutan, tetapi sudah menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh semua



pelaku usaha yang berasal dari bahan asal hewan. Pelayanan Kesmavet melalui penertiban peredaran bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sosialisasi kepada petugas maupun kepada pelaku usaha, public awareness, standarisasi, penataan dan evaluasi kios daging guna memotivasi perdagangan yang lebih higienis, dan sosialisasi pada pelaku usaha tentang PAH ASUH.

Keberhasilan fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengolahan dan Pemasaran, BVET Baso, UPTD Balai Labor dan Klinik Hewan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner :

#### **a. Tantangan**

- 1) Peredaran hewan, dan bahan asal hewan yang berdampak pada keamanan sumber daya ternak genetik yang sulit dikendalikan.
- 2) Adanya ancaman penyakit hewan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan yang tidak terkendali.
- 3) Perubahan iklim global yang ekstrim.
- 4) Luasnya cakupan wilayah pelayanan kesehatan hewan dan jenis layanan kesehatan hewan.
- 5) Beragamnya kelembagaan kesehatan hewan
- 6) Masih adanya zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui pangan asal hewan (food born disease).
- 7) Masih adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
- 8) Masih adanya peredaran daging glonggongan, daging illegal, daging babi, bahan pengawet pada pangan hewani, cemaran kimiawi, biologis dan fisik yang meresahkan masyarakat konsumen.
- 9) Masih terjadinya pemotongan hewan di TPH yang belum sesuai prosedur yang ditetapkan.
- 10) Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

- 11) Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengujikan produk hewani di Laboratorium Kesmavet.
- 12) Prasarana dan sarana yang dimiliki TPH, Los/kiosDaging, Usaha Pangan hewani (daging, telur, susu) masih kurang memenuhi standard teknis.
- 13) Masyarakat dan pelaku usaha maupun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota yang membidangi fungsi kesmavet belum optimal dalam memanfaatkan fungsi Laboratorium Kesmavet.
- 14) Belum diberlakukannya penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundangan di bidang Kesmavet.

**b. Peluang**

- 1) Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan hewan prima yang membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan.
- 2) Pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang semakin meningkat.
- 3) Tuntutan kompetensi terhadap petugas medis dan paramedis veteriner serta standarisasi pelayanan bidang kesehatan hewan.
- 4) Tuntutan standarisasi keswan dibidang usaha peternakan dan kesehatan hewan.
- 5) Keselarasan kegiatan kesehatan hewan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.
- 6) Terjaminnya keamanan, kesehatan, dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewani yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).
- 7) Adanya tuntutan global terhadap penerapan kesejahteraan hewan (animal welfare).
- 8) Meningkatnya permintaan masyarakat akan labelisasi halal pada produk peternakan.
- 9) Tuntutan pelaku Usaha (eksportir, distributor, industri produk pangan hewani) terhadap sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan hewani.
- 10) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi produk hewani.
- 11) Meningkatnya jumlah usaha di bidang produk pangan asal hewan.
- 12) Meningkatnya kebutuhan kemampuan uji laboratorium dan pengujian laboratorium terakreditasi.
- 13) Berkembangnya teknologi pengujian yang semakin modern.

### **3. Fungsi Pemasaran Produk Peternakan dan Prasarana dan Sarana**

Pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi usaha peternakan kecil. Ciri usaha ini diantaranya adalah kepemilikan modal usaha ternak yang sangat terbatas, skala usaha yang kecil, minimnya penguasaan teknologi, akses pasar yang terbatas, dan sifat kegiatan atau usaha belum efisien karena hanya bersifat sebagai usaha sampingan. Dengan demikian maka fungsi usaha peternakan dalam pelaksanaannya adalah sebagai fasilitator dan motivator agar kegiatan usaha peternakan rakyat dapat lebih berkembang dan memiliki nilai tawar yang dapat dijadikan sumber penghidupan atau kegiatan usaha tani yang mapan.

Keberhasilan fungsi usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh Bidang Prasarana dan Sarana dan Bidang Keswan, Kesmavet dan pengolahan dan pemasaran.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi pemasaran produk peternakan.

#### **a. Tantangan**

- 1) Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan.
- 2) Masih sulit kelompok ternak dan pelaku usaha peternakan mempersiapkan usahanya untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh kredit lunak (skim kredit) dari lembaga pembiayaan.
- 3) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha pengolahan produk ternak dalam penerapan Good Manufacturing Practice (GMP)/Good Handling Practice (GHP) dan standarisasi mutu pengolahan hasil peternakan.
- 4) Terbatasnya akses informasi harga pasar dan pemasaran produk olahan hasil peternakan.
- 5) Minimnya teknologi dan sarana dan prasarana untuk pengolahan produk peternakan.

#### **b. Peluang**

- 1) Program Pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui lembaga perbankan.
- 2) Kemitraan (Inti Plasma) antara Poknak/Gapoknak dengan pihak investor perusahaan peternakan.

- 3) Terbukanya kerjasama dengan industri pengolahan hasil produk peternakan dalam pembinaan, pelatihan dan pemasaran bagi peternak/poknak/pelaku usaha produk olahan hasil ternak.
- 4) Fasilitasi penyebaran informasi pasar (komoditas peternakan) oleh media cetak dan elektronik.
- 5) Penyediaan teknologi untuk pengolahan hasil peternakan.
- 6) Prasarana dan sarana yang memadai untuk usaha pengolahan produk peternakan
- 7) Bimbingan teknis bagi pelaku pengolah hasil peternakan.

#### **4. Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam rangka mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan strategis yang berkembang dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim global diperlukan sumberdaya manusia yang siap pakai, professional, inovatif, kreatif dan berwawasan global guna mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif, efisien, berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku pembangunan pertanian khususnya peternakan.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi SDM.

Disamping meningkatkan SDM peternak dalam wadah kelompok ternak perlu juga untuk menguatkan kelembagaan kelompok tani ternak dari unsur administrasi dan kejelasan serta kelegalan kelompok tersebut, sehingga kelompok mampu bersaing untuk mendapatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal permodalan. Hal ini merupakan tanggung jawab Bidang Penyuluhan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

##### **a. Tantangan**

- 1) Adaptasi Teknologi Informasi lambat
- 2) Masuknya sektor industri ke nagari, memungkinkan berpindahnya potensi tenaga kerja peternakan ke sektor lain.
- 3) Peternak yang dilatih meninggalkan tempat pada waktu pelatihan karena tidak ada yang memelihara ternaknya selama mengikuti pelatihan.
- 4) Lemahnya kelembagaan kelompok baik administrasi ataupun SDM anggota kelompok

- 5) Komitmen anggota kelompok dalam wadah kelembagaan yang legal.

**b. Peluang**

- 1) Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan peternak;
- 2) Tingginya minat peternak untuk mengikuti pelatihan;
- 3) Derajat kesehatan ternak, Pengembangan ternak dan pakan masih kurang;
- 4) Tersedianya peluang usaha dan pasar untuk para peternak.
- 5) Kurangnya konsekwen dan komitmen peternak dalam berkelompok.

**5. Fungsi Kesekretariatan**

Dari Aspek kesekretariatan dan pelaksanaan pembangunan peternakan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penyempurnaan penyusunan program dan anggaran pada program dan kegiatan di Dinas Peternakan. Dari aspek kepegawaian organisasi serta administrasi perkantoran dan keuangan telah dibenahi dengan berbagai laporan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk penyusunan pelaksanaan administrasi keuangan dan asset yang makin berkualitas.

**b. Tantangan :**

- 1) Perencanaan yang tidak didukung dengan ketersediaan anggaran
- 2) Kurangnya jumlah ASN sesuai disiplin ilmu teknis yang dibutuhkan
- 3) Adanya asset yang tidak bermanfaat.

**c. Peluang :**

- 1) Meningkatkan anggaran sesuai kebutuhan dan tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2) Penambahan ASN sesuai kebutuhan
- 3) Menata ulang asset
- 4) Menyediakan laporan yang akurat

Dari hasil analisis tersebut Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota akan dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta program yang secara umum mencakup perubahan-perubahan pada aspek sumber daya manusia peternak, meningkatkan kualitas bibit dan populasi, meningkatkan status kesehatan hewan, sarana dan prasarana, teknologi, sistem informasi, kerangka regulasi

dan kelembagaan. Beberapa aspek yang harus ditingkatkan ini menentukan arah kebijakan dan strategi yang akan dirumuskan pada uraian selanjutnya. Perlunya suatu program baru berimplikasi pada anggaran maupun indikator kinerja program dan kegiatan yang akan tercermin dalam informasi kinerja dengan mempertimbangkan cascading sasaran strategis peternakan, program dan kegiatan masing-masing bidang.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Pada Tabel **T-B.35** diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari pelayanan dinas, Renstra Kementerian Pertanian, kajian RTRW dan KLHS.

Tujuan umum pembangunan peternakan adalah untuk peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan, dan peningkatan daya saing produk peternakan.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan adalah ancaman penyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada **Tabel T-B 35**.

Tabel T-B.35

## Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya populasi dan produktivitas peternakan	Masih rendahnya persediaan dan pengembangan sarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya jumlah ternak yang diuji performannya</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pengendalian terhadap penyediaan benih, bibit ternak dan hijauan pakan ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pengawasan terhadap produksi benih, bibit dan hijauan pakan ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah peredaran benih/bibit ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah wilayah yang dilakukan pemetaan sumber bibit ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah recording benih dan bibit ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pelaksanaan IB, PKB dan Pendataan Kelahiran</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pendistribusian benih dan bibit ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pengawasan mutu pakan/sample</li> <li>- Masih rendahnya jumlah kelompok yang dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengembangan sarana peternakan</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pengawasan terhadap penggunaan sarana pendukung peternakan</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pengawasan obat hewan</li> <li>- Masih sedikitnya jenis pakan ternak yang beredar</li> <li>- Masih rendahnya jumlah jumlah pelaku usaha yang mengikuti GFP Ruminansia</li> <li>- Masih rendahnya jumlah jumlah pelaku usaha yang mengikuti GFP Non Ruminansia</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya jumlah pola penyebaran ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah kelompok yang diberikan pelatihan tentang peningkatan kualitas pakan ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pemeriksaan kandungan nutrisi pakan ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pengadaan bibit ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah jenis pengadaan bibit ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pengadaan hijauan pakan ternak dan konsentrat</li> <li>- Masih rendahnya jumlah peneyediaan benih ternak dan sarana lainnya (Frozen, N2 Cair, Plastik sheet, plastic glove, tissue dll)</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pendistribusian benih ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pendistribusian bibit ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah lokasi/kelompok yang diseleksi untuk penyebaran benih dan bibit ternak</li> </ul>
2.		Belum Optimalnya pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya jumlah pengendalian Penyakit Hewan Menular</li> <li>- Masih rendahnya jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan</li> <li>- Masih rendahnya jumlah Pengawasan Peredaran Obat Hewan</li> <li>- Masih rendahnya jumlah pengendalian penyakit hewan zoonosis</li> <li>- Masih rendahnya jumlah Pengawasan Pematangan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)</li> <li>- Belum Optimalnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan Produk Ternak</li> <li>- Masih rendahnya jumlah Unit Usaha Peternakan yang menerapkan Sanitasi dan Higienes serta memiliki Sertifikat NKV</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Semua pemotongan Hewan terdata</li> <li>- Masih rendahnya jumlah Pelaku Usaha Pengolah Hasil Peternakan yang Produktif</li> <li>- Masih rendahnya jumlah produksi hasil olahan produk peternakan</li> <li>- Kurangnya promosi pemasaran produk peternakan</li> </ul>
3.		Masih rendahnya Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan</li> <li>- Masih rendahnya Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan</li> <li>- Masih rendahnya Jumlah Pengawasan pelaksanaan Izin usaha Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Masih rendahnya Jumlah Lahan Padang Pengembalaan Umum yang di Identifikasi</li> <li>- Masih rendahnya Jumlah Lahan Padang Pengembalaan Umum yang telah dikelola</li> <li>- Masih rendahnya Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Padang Pengembalaan umum</li> <li>- Masih rendahnya Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan</li> <li>- Masih rendahnya Jumlah Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit</li> <li>- Masih rendahnya Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit</li> </ul>

4.		Masih rendahnya kualitas penyuluhan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Kelompok Petani yang belum optimal</li> <li>- Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian yang belum optimal</li> <li>- Pelayanan Informasi yang belum optimal</li> <li>- Kurangnya jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Subsektor Peternakan</li> <li>- Rendahnya SDM Peternak sebagai Pelaku Utama</li> <li>- Kurangnya Motivasi Kelembagaan Petani untuk Meningkatkan SDM</li> <li>- Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan</li> <li>- Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Petani yang belum Optimal</li> <li>- Kurangnya Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Subsektor Peternakan</li> <li>- Penyuluh kurang termotivasi dalam meningkatkan kinerja</li> <li>- Terbatasnya kesempatan penyuluh dalam tranformasi ilmupengetahuan dan teknologi yang berkembang</li> <li>- Fasilitas Penunjang Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh yang tidak memadai</li> <li>- Kurangnya sarana untuk mengakses informasi</li> <li>- Kurangnya alat bantu penyuluhan yang dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan</li> <li>- Kurang tersedianya buku dan hasil Publikasi yng dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh pertanian antara lain dalam penyusunan materi penyuluhan</li> <li>- Kurangnya Fasilitas bagi pelaku utama untuk transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam bentuk sekolah lapang</li> </ul>
----	--	---	---

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah adalah **“Mengwujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradab dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Sehubungan dengan visi, misi kepala daerah dan sasaran RPJMD maka permasalahan yang muncul dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

**Tabel 35.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota**

No.	Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	Kualitas Bibit	Keterbatasan bibit yang berkualitas	Tingginya permintaan bibit mendorong dinas Peternakan Prov untuk menyusun regulasi
2		Rendahnya produksi pangan asal ternak	Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas	Pemenuhan tenaga lapangan sesuai dengan

			lapangan	persyaratan teknis dan peningkatan kapasitasnya
		Tingginya harga kosentrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak kepada produktifitas ternak	Tingginya harga kosentrat dan ketergantungan terhadap bahan baku impor	Regulasi penyediaan bahan baku pakan ternak
		Rendahnya pelayanan kesehatan ternak dan hewan	Menurunnya status kesehatan ternak	Kapasitas petugas dan sarana dan prasarana yang memadai
		Keterbatasan sarana dan prasarana serta teknologi terapan untuk mendukung produk peternakan	Rendahnya SDM peternak	SDM Peternak untuk memanfaatkan teknologi yang ada
		Lemahnya kapasitas kelembagaan peternak dan penyuluh	Keterbatasan jumlah dan tenaga penyuluh serta kurangnya bimtek untuk kelompok ternak	Peningkatan kapasitas pemnyuluh, peternak dan kelembagaan

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat

#### Telaahan Renstra kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian yaitu :

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gontong Royong”**

Sedangkan Misi Kementerian

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan Ketahanan pangan,
2. Meningkatkan Nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan Prasarana Kementrian Pertanian

Penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rencana Strategis OPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah :

### **Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan**

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Tata Kahidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarakan Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Produk Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta ekonomi digital.
5. Meningkatkan ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
7. Mengwujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-3 yaitu Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Produk Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada akhirnya harus berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan dengan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan melalui pengembangan usaha peternakan berbasis kawasan sesuai potensi wilayahnya.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Provinsi Sumatera Barat dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.3.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Pertumbuhan komoditas pangan peningkatan produksi daging 4,25 % peningkatan produksi telur 4,42% peningkatan produksi susu 9,74</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada regulasi yang mendorong berkembangnya usaha peternakan</li> <li>- Belum berkembangnya usaha pembibitan dimasyarakat, karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal</li> <li>- Tingginya harga konsentrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak pada produktifitas ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi impor daging berbasis pada harga bukan pada kebutuhan</li> <li>- Rendahnya jumlah bibit yang dihasilkan oleh UPTD perbibitan dan belum semua Sumber daya genetik Sumatera Barat telah dikembangkan di UPTD Perbibitan</li> <li>- Tingginya harga konsentrat dikarenakan ketergantungan bahan baku terhadap impor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas</li> <li>- Tingginya permintaan bibit ternak dari Sumatera Barat mendorong berkembangnya usaha perbibitan</li> <li>- Sumatera Barat mempunyai potensi plasma nutfah ternak meliputi Sapi Pesisir, Itik Bayang, Itik Pitalah, Ayam Kokok balenggek</li> </ul>

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**  
**Provinsi Sumatera Barat**  
**Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkup Kabupaten Kota**  
**yang menangani Peternakan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Pertumbuhan Tingkat Produksi Rata-rata komoditas peternakan di Kab/ Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daging 3,35%</li> <li>- Susu 7,58 %</li> <li>- Telur 0,39 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal</li> <li>- Tingginya harga konsentrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak pada produktivitas ternak</li> <li>- Keterbatasan akses petani terhadap teknologi, informasi dan permodalan</li> <li>- Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur aparat yang menangani peternakan di Kab/ Kota bervariasi</li> <li>- Kurang berkembangnya Usaha Perbibitan di masyarakat</li> <li>- Tingginya harga konsentrat dikarenakan ketergantungan bahan baku terhadap impor</li> <li>- Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas lapangan Kab/ Kota</li> <li>- Lemahnya kapasitas peternak dan kelembagaan kelompok ternak sehingga sulit untuk mengakses permodalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas</li> <li>- Sebagian Kab/Kota telah memiliki Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Tingginya permintaan bibit ternak dari Sumatera Barat mendorong berkembangnya usaha perbibitan</li> <li>- Sumatera Barat mempunyai potensi plasma nutfah ternak, meliputi Sapi Pesisir, Itik Bayang, Itik Pitalah, Ayam</li> </ul>



			Tingginya lalu lintas ternak dan bahan asal ternak - dan bahan asal ternak - Motivasi masyarakat untuk beternak sangat dipengaruhi oleh kondisi harga jual produk ternak	Kokok Balenggek
--	--	--	--	-----------------

Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra yang menangani peternakan bahwa dalam mendukung peningkatan pertumbuhan komoditas pangan (susu, daging, telur) sesuai target Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat permasalahan diantaranya :

1. Belum ada regulasi yang mendorong berkembangnya usaha Peternakan.
2. Belum berkembangnya usaha pembibitan di masyarakat.
3. Tingginya harga konsentrat
4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan.
5. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh, dan
6. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pangan ASUH.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup optimal, Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka aktivitas pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup dengan terus mengupayakan secara optimal langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa masalah pokok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

#### **a. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Kualltas Lingkungan Hidup masih rendah dilihat dari nilai IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2020 masih berada di bawah target dan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pencapaian IKLH Kabupaten lima Kota tahun 2020 adalah 69,13. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah :

- Indeks kualitas air masih rendah.
- Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum sesuai dengan ketentuan
- Penanganan terhadap bahaya kebakaran belum optimal
- Kinerja pengurangan timbulan dan penanganan sampah masih rendah

Kualitas air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas air sungai seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi Kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Di pihak lain, sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan semakin menurun.

Pencemaran udara merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan tidak terkecuali di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota terlihat yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O<sub>3</sub>) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan konsumsi energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan luas tutupan lahan saat ini, termasuk RTH, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, belum mampu mengimbangi pencemaran udara yang ditimbulkan. Hal ini akan berdampak serius pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi (0,93) mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Sampai tahun 2020, penambahan volume sampah belum dapat ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan maupun penanganan, sehingga sampah masih menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah. Belum adanya peraturan daerah serta master plan pengelolaan sampah, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana persampahan mengakibatkan cakupan layanan pengelolaan sampah belum dapat menjangkau seluruh Kecamatan. Layanan setiap hari baru bisa dilaksanakan pada nagari-nagari yang

termasuk dalam kawasan IKK Sarilamak, walaupun belum maksimal, Sedangkan layanan terhadap nagari yang lain di Kecamatan Harau serta di nagari-nagari yang menjadi pusat kecamatan baru dapat diupayakan 1 kali dalam seminggu sesuai kemampuan.

b. Rendahnya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tingkat kepatuhan terhadap tata ruang akan memiliki kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampai tahun 2020, tingkat kepatuhan terhadap RTRW baru mencapai 60%, yang dapat diartikan bahwa baru 60% dari pemanfaatan ruang yang terjadi saat ini yang sesuai dengan peruntukan yang sudah direncanakan dalam RTRW.

Dari fakta dan realita yang ada, tingkat kepatuhan terendah terjadi di kawasan IKK Sarilamak. Hal ini disebabkan oleh :

- Belum optimalnya fungsi RTRW sebagai dalam aktivitas pembangunan.
- Belum terpenuhinya norma prosedur dan kriteria (NSPK) penataan ruang yang dibutuhkan.
- Belum optimalnya penataan kawasan strategi dan pusat pertumbuhan.
- Lemahnya pemanfaatan ruang.

1. Strategi Isu KLHS,

Rumusan Strategi Isu Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Hasil Konsultasi Publik yaitu

- a. Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3
- b. Tingginya Intensitas Bencana Alam
- c. Menurunnya kualitas air dan rendahnya kapasitas penyediaan air bersih
- d. Tingginya Intensitas Alih Fungsi Lahan
- e. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

2. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Mengendalikan alih fungsi lahan pangan
- b. kualitas daerah tangkapan air dan tekanan air permukaan dan air tanah

- c. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan bencana sebagai kawasan setempat.
- d. Mengendalikan sumber-sumber pencemaran air baik dari domestik dan industry
- e. semaksimal mungkin ruang yang terbatas untuk digunakan, tanpa merusak dayadukungnya. Pada wilayah yang pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, diperlukan upaya pengembangan menggunakan vertical
- f. pertanian yang berkelanjutan, terutama untuk menekan kerusakan lahan, serta memaksimalkan semaksimal mungkin laju erosi permukaan
- g. Pengembangan ekonomi daerah berbasiskan kekayaan keanekaragaman hayati, pengembangan energi baru dan terbarukan.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi yang bergunung (dengan kelerengan lebih dari 40%) yaitu sekitar 56,5% dari luas wilayah kabupaten, sedangkan kelerengan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya yaitu dibawah 40% sekitar 43,5% dari luas wilayah kabupaten topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang, dan berbukit-bukit.

Pada saat ini kawasan pengembangan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi dua. Sebelah Selatan merupakan daerah pengembangan ternak besar berupa sapi potong dan sapi perah, di sebelah utara merupakan wilayah pengembangan ternak unggas. Berdasarkan kesesuaian dan daya dukung lahan, wilayah potensial untuk pengembangan ternak besar adalah di Kecamatan Akabiluru, Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Bukik Barisan, Gunuang Omeh, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru untuk ternak besar. Sedangkan untuk unggas terutama ayam ras petelur dan ayam potong dilokasikan di Kecamatan Mungka, Guguak dan Payakumbuh.

Kecamatan Harau merupakan IKK (Ibu Kota Kabupaten) yang memiliki kawasan tertentu untuk pengembangan peternakan. Berdasarkan RTRW IKK ada beberapa wilayah yang dilarang untuk pengembangan komoditi peternakan, namun wilayah tersebut mempunyai jarak yang sangat jauh dengan IKK dan sangat berpotensi untuk pengembangan wilayah peternakan, seperti nagari Bulu Kasok. Sementara Nagari Solok Bio-Bio merupakan wilayah yang diperbolehkan untuk pengembangan komoditi peternakan namun wilayah ini sangat dekat jaraknya dengan daerah wisata Harau.

Hal ini terdapat kesenjangan atau tidak sinkronnya antara RTRW yang telah disusun dengan kenyataan dilapangan. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka pengembangan peternakan disesuaikan dengan potensi lahan dan sumber daya alam.

Keberhasilan pembangunan peternakan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan untuk pemukiman sehingga beresiko terhadap alih fungsi lahan peternakan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW didukung dengan regulasi yang dapat melindungi kelestarian lahan peternakan di Sumatera Barat. Selain itu diperlukan juga optimalisasi pengembangan kawasan peternakan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan produk hewan di masyarakat. Permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota beserta faktor penghambat dan faktor pendorong pembangunan peternakan secara rinci sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5 Telaah Rancangan Tata Ruang Wilayah**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Rencana Kawasan Peternakan	Pengembangan kawasan peternakan belum optimal dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang terus meningkat</li> <li>- Kebutuhan lahan untuk perumahan dan infrastruktur dan pengembangan usaha masyarakat yang masih menyebabkan terbatasnya pengembangan usaha</li> <li>- Kurangnya penegakan RTRW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan akan Produk Hewan yang terus meningkat mendorong pemanfaatan kawasan peternakan</li> <li>- Kebijakan kepala daerah tentang penerapan kawasan Peternakan</li> </ul>

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD sebagaimana terlihat pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6 Hasil Telaahan Pola Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1.	Rencana Kawasan Peternakan	1. Kawasan Integrasi 2. Kawasan Sapi Potong 3. Kawasan Unggas 4. Kawasan Itik 5. Kawasan Sapi Perah 6. Kawasan ternak Kambing	1. Program Pengembangan Kawasan Sentra Program 2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Program 3. Peningkatan Sarana Prasarana Program 4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pertanian Program 5. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program 6. Pengamanan Sumber Daya Hewani	Perlunya peningkatan konsentrasi di beberapa wilayah yang tertuang dalam infra struktur ruang saat ini	Kawasan Integrasi di 3 kecamatan Kawasan sapi potong di 10 kecamatan Kawasan Unggas di 7 kecamatan Kawasan Itik di 10 kecamatan Kawasan Sapi Perah di 1 kecamatan Kawasan ternak Kambing di 13 kecamatan

Dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dampak yang dihasilkan oleh beberapa kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain pencemaran lingkungan akibat limbah ternak yang dihasilkan, pencemaran lingkungan

akibat penggunaan bahan kimia. Untuk meminimalisir dampak tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan :

- 1) Memperhatikan lingkungan dengan pemanfaatan limbah ternak untuk biogas maupun pupuk organik, serta memperhatikan sarana produksi dan pengolahan hasil produk peternakan yang ramah lingkungan;
- 2) Penataan kawasan usaha peternakan sesuai RT RW.
- 3) Penghijauan dilokasi usaha peternakan.

### **3.5 Penentuan isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan daerah baik pada waktu sekarang maupun masa datang. Isu strategis pada dasarnya menyangkut unsur dan aspek yang sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Karakteristik isu-isu strategis adalah kondisi yang mendasar, berjangka panjang dan mendesak serta menentukan pencapaian tujuan pembangunan.

Apabila isu-isu strategis tidak diantisipasi secara baik akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan peternakan secara internal sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya serta kondisi eksternal yang terjadi, maka beberapa isu strategis yang merupakan akar permasalahan serta mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan peternakan 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya jumlah ternak yang diuji performannya
- b. Masih rendahnya jumlah pengendalian terhadap penyediaan benih, bibit ternak dan hijauan pakan ternak
- c. Masih rendahnya jumlah pengawasan terhadap produksi benih, bibit dan hijauan pakan ternak
- d. Masih rendahnya jumlah peredaran benih/bibit ternak
- e. Masih rendahnya jumlah wilayah yang dilakukan pemetaan sumber bibit ternak
- f. Masih rendahnya jumlah recording benih dan bibit ternak

- g. Masih rendahnya jumlah pelaksanaan IB, PKB dan Pendataan Kelahiran
- h. Masih rendahnya jumlah pendistribusian benih dan bibit ternak
- i. Masih rendahnya jumlah pengawasan mutu pakan/sample
- j. Masih rendahnya jumlah kelompok yang dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengembangan sarana peternakan
- k. Masih rendahnya jumlah pengawasan terhadap penggunaan sarana pendukung peternakan
- l. Masih rendahnya jumlah pengawasan obat hewan
- m. Masih sedikitnya jenis pakan ternak yang beredar
- n. Masih rendahnya jumlah jumlah pelaku usaha yang mengikuti GFP Ruminansia
- o. Masih rendahnya jumlah jumlah pelaku usaha yang mengikuti GFP Non Ruminansia
- p. Masih rendahnya jumlah pola penyebaran ternak
- q. Masih rendahnya jumlah kelompok yang diberikan pelatihan tentang peningkatan kualitas pakan ternak
- r. Masih rendahnya jumlah pemeriksaan kandungan nutrisi pakan ternak
- s. Masih rendahnya jumlah pengadaan bibit ternak
- t. Masih rendahnya jumlah jenis pengadaan bibit ternak
- u. Masih rendahnya jumlah pengadaan hijauan pakan ternak dan konsentrat
- v. Masih rendahnya jumlah penyediaan benih ternak dan sarana lainnya (Frozen, N2 Cair, Plastik sheet, plastic glove, tissue dll)
- w. Masih rendahnya jumlah pendistribusian benih ternak
- x. Masih rendahnya jumlah pendistribusian bibit ternak
- y. Masih rendahnya jumlah lokasi/kelompok yang diseleksi untuk penyebaran benih dan bibit ternak
- z. Masih rendahnya jumlah pengendalian Penyakit Hewan Menular
- aa. Masih rendahnya jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan
- bb. Masih rendahnya jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan
- cc. Masih rendahnya jumlah Pengawasan Peredaran Obat Hewan
- dd. Masih rendahnya jumlah pengendalian penyakit hewan zoonosis



- ee. Masih rendahnya jumlah Pengawasan Pemotongan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
- ff. Belum Optimalnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan Produk Ternak
- gg. Masih rendahnya jumlah Unit Usaha Peternakan yang menerapkan Sanitasi dan Higienes serta memiliki Sertifikat NKV
- hh. Belum Semua pemotongan Hewan terdata
- ii. Masih rendahnya jumlah Pelaku Usaha Pengolah Hasil Peternakan yang Produktif
- jj. Masih rendahnya jumlah produksi hasil olahan produk peternakan
- kk. Kurangnya promosi pemasaran produk peternakan
- ll. Masih rendahnya Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
- mm. Masih rendahnya Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
- nn. Masih rendahnya Jumlah Pengawasan pelaksanaan Izin usaha Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan
- oo. Masih rendahnya Jumlah Lahan Padang Pengembalaan Umum yang di Identifikasi
- pp. Masih rendahnya Jumlah Lahan Padang Pengembalaan Umum yang telah dikelola
- qq. Masih rendahnya Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Padang Pengembalaan umum
- rr. Masih rendahnya Jumlah Pembangunan Prsarana Peternakan
- ss. Masih rendahnya Jumlah Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit
- tt. Masih rendahnya Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit
- uu. Pembinaan Kelompok Petani yang belum optimal
- vv. Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian yang belum optimal
- ww. Pelayanan Informasi yang belum optimal
- xx. Kurangnya jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Subsektor Peternakan
- yy. Rendahnya SDM Peternak sebagai Pelaku Utama

- zz. Kurangnya Motivasi Kelembagaan Petani untuk Meningkatkan SDM
- aaa. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan
- bbb. Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Petani yang belum Optimal
- ccc. Kurangnya Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Subsektor Peternakan
- ddd. Penyuluh kurang termotivasi dalam meningkatkan kinerja
- eee. Terbatasnya kesempatan penyuluh dalam transformasi ilmupengetahuan dan teknologi yang berkembang
- fff. Fasilitas Penunjang Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh yang tidak memadai
- ggg. Kurangnya sarana untuk mengakses informasi
- hhh. Kurangnya alat bantu penyuluhan yang dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan
- iii. Kurang tersedianya buku dan hasil Publikasi yng dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh pertanian antara lain dalam penyusunan materi penyuluhan
- jjj. Kurangnya Fasilitas bagi pelaku utama untuk transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam bentuk sekolah lapang

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi Kepala Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**TABEL T-C.25**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Sektor Peternakan)	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	2%	4%	6%	8%	10%	12%
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	2%	4%	6%	8%	10%	12%
			Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2%	4%	6%	8%	10%	12%
			Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Persentase Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian	2%	4%	6%	8%	10%	12%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	BB	BB

Bertolak dari misi yang ditetapkan di atas, maka **tujuan** yang ingin dicapai dan diwujudkan pada akhir pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Pesentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa mendatang. Untuk dapat mewujudkan kondisi imajiner tersebut, maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi organisasi dengan arah pembangunan yang akan dilakukan, visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan organisasi dalam konteks pembangunan daerah dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan organisasi dan setiap perangkatnya untuk berbuat demi kepentingan organisasi pemerintahan daerah menciptakan makna bagi masyarakat yang dilayani, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan yang ada sekarang dengan keadaan masa depan. Oleh karena itu visi rencana strategis yang disusun haruslah sesuai dengan kaidah dan kebutuhan organisasi dan masyarakat serta kebutuhan daerah. Dengan kata lain visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan sesuai dengan tabel T-C.26.

**Tabel. T-C.26**  
**Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Mengwujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Misi II : Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan di Tingkat Lokal dan regional

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Sektor Peternakan)	1	Meningkatnya Populasi dan Produktivitas Peternakan	1	Meningkatkan persediaan dan pengembangan sarana pertanian	-	Meningkatkan populasi sapi dari 45.000 menjadi 100.00. ekor
						-	Meningkatkan Populasi kambing menjadi 1 juta ekor
				2	Meningkatkan upaya Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	-	Meningkatkan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
				3	Meningkatkan upaya-upaya penyuluhan pertanian	-	Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan
				4	Meningkatkan pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Program pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan bagian integral pembangunan pertanian sub sektor peternakan pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan.

Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Rencana program beserta indikator keluaran program per pagu kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 akan melaksanakan 6 Program yang terdiri dari 22 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan yang disertai kebutuhan dan/pagu indikatif dengan uraian sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.27 sebagai berikut :

**TABEL T-C.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2021 - 2026**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Tahun	Tugas	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Penanggung Jawab OPD	Lokasi
								Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Target		Rp				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2021	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
<b>(2.xx) - URUSAN PILIHAN</b>																										
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	01	2.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	10.229.364.157	100%	11.860.960.175	100%	13.178.844.640	100%	15.864.201.777	100%	18.243.832.044	100%	20.980.406.850	100%	90.357.609.644	Disnak Keswan	Kab LPK			
3			01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	100%	33.200.523	100%	36.889.470	100%	40.988.300	100%	42.800.000	100%	45.220.000	100%	49.503.000	100%	398.601.293	Disnak Keswan	Kab LPK			
3			01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja	100%	5 Dokumen	6.097.275	5 Dokumen	6.774.750	5 Dokumen	7.527.500	5 Dokumen	8.280.250	5 Dokumen	9.108.275	5 Dokumen	10.019.109	100%	47.807.153	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	02.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya RKA SKPD	100%	1 Dokumen	2.932.200	1 Dokumen	3.258.000	1 Dokumen	3.620.000	1 Dokumen	3.982.000	1 Dokumen	4.380.200	1 Dokumen	4.818.200	100%	22.990.620	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA SKPD	100%	1 Dokumen	2.992.950	1 Dokumen	3.325.500	1 Dokumen	3.695.000	1 Dokumen	4.064.500	1 Dokumen	4.470.950	1 Dokumen	4.918.045	100%	23.466.945	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya DPA SKPD	100%	1 Dokumen	2.982.015	1 Dokumen	3.313.350	1 Dokumen	3.681.500	1 Dokumen	4.049.650	1 Dokumen	4.454.615	1 Dokumen	4.900.077	100%	23.381.207	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan DPA SKPD	100%	1 Dokumen	3.170.583	1 Dokumen	3.522.870	1 Dokumen	3.914.300	1 Dokumen	4.305.730	1 Dokumen	4.736.303	1 Dokumen	5.209.933	100%	24.859.719	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan, Tersedianya Dokumen LKIP, Tersedianya Dokumen SAKIP, Tersedianya Dokumen SIP	100%	5 Dokumen	7.168.500	5 Dokumen	7.965.000	5 Dokumen	8.850.000	5 Dokumen	9.735.000	5 Dokumen	10.708.500	5 Dokumen	11.779.350	100%	56.206.350	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	1 Dokumen	7.857.000	1 Dokumen	8.730.000	1 Dokumen	9.700.000	1 Dokumen	10.670.000	1 Dokumen	11.737.000	1 Dokumen	12.910.700	100%	61.604.700	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi keuangan</b>	100%	100%	8.443.317.955	100%	9.381.464.394	100%	10.423.849.327	100%	11.466.234.260	100%	12.612.857.686	100%	13.874.143.454	100%	66.201.867.076	Disnak Keswan	Kab LPK			
3			01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OP	100%	12 Bulan	8.431.591.180	12 Bulan	9.368.434.644	12 Bulan	10.409.371.827	12 Bulan	11.450.309.010	12 Bulan	12.595.339.911	12 Bulan	13.854.873.902	100%	66.109.920.473	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SPM, SPP dan Setoran Retribusi	100%	1.215.000	SPM, SPP dan Setoran Retribusi	1.350.000	SPM, SPP dan Setoran Retribusi	1.500.000	SPM, SPP dan Setoran Retribusi	1.650.000	SPM, SPP dan Setoran Retribusi	1.815.000	SPM, SPP dan Setoran Retribusi	1.996.500	100%	9.526.500	Disnak Keswan	Kab LPK			
3			01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	12 Bulan	1.830.600	12 Bulan	2.034.000	12 Bulan	2.260.000	12 Bulan	2.486.000	12 Bulan	2.734.000	12 Bulan	3.008.060	100%	14.353.260	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Rekonsiliasi Realisasi Keuangan	100%	12 Bulan	1.547.100	12 Bulan	1.719.000	12 Bulan	1.910.000	12 Bulan	2.101.000	12 Bulan	2.311.100	12 Bulan	2.542.210	100%	12.130.410	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1 Dokumen	1.067.175	1 Dokumen	1.185.750	1 Dokumen	1.317.500	1 Dokumen	1.469.250	1 Dokumen	1.594.175	1 Dokumen	1.753.593	100%	8.367.443	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	1 Dokumen	2.835.000	1 Dokumen	3.150.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.850.000	1 Dokumen	4.255.000	1 Dokumen	4.658.500	100%	22.728.500	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	100%	12 Bulan	1.615.950	12 Bulan	1.795.500	12 Bulan	1.995.000	12 Bulan	2.194.500	12 Bulan	2.413.950	12 Bulan	2.655.345	100%	12.670.245	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	12 Bulan	1.615.950	12 Bulan	1.795.500	12 Bulan	1.995.000	12 Bulan	2.194.500	12 Bulan	2.413.950	12 Bulan	2.655.345	100%	12.670.245	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi barang milik Daerah</b>	100%	100%	6.050.700	100%	6.723.000	100%	7.470.000	100%	8.195.000	100%	9.021.250	100%	9.944.438	100%	86.134.388	Disnak Keswan	Kab LPK			
3			01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya RKBM Diunakkeswan	100%	1 Dokumen	1.352.700	1 Dokumen	1.503.000	1 Dokumen	1.670.000	1 Dokumen	1.837.000	1 Dokumen	2.020.700	1 Dokumen	2.222.770	100%	10.606.170	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Penilaian Barang Milik Daerah	100%	1 Laporan	1.458.000	1 Laporan	1.620.000	1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	1.980.000	1 Laporan	2.178.000	1 Laporan	2.395.800	100%	11.431.800	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Pembinaan dan pengawasan serta pengendalian barang milik daerah	100%	1 Laporan	891.000	1 Laporan	990.000	1 Laporan	1.100.000	1 Laporan	1.210.000	1 Laporan	1.331.000	1 Laporan	1.464.100	100%	6.986.100	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	1 Laporan	1.239.300	1 Laporan	1.377.000	1 Laporan	1.530.000	1 Laporan	1.683.000	1 Laporan	1.851.300	1 Laporan	2.036.430	100%	9.717.030	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	1 Laporan	1.109.700	1 Laporan	1.233.000	1 Laporan	1.370.000	1 Laporan	1.507.000	1 Laporan	1.657.700	1 Laporan	1.823.470	100%	8.700.870	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	100%	71.392.590	100%	79.325.100	100%	88.139.000	100%	97.287.000	100%	107.806.250	100%	119.977.188	100%	1.047.515.128	Disnak Keswan	Kab LPK			
3			01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kerengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga dan atributnya	100%	100 Stel	40.500.000	100 Stel	45.000.000	100 Stel	50.000.000	100 Stel	55.000.000	100 Stel	60.500.000	100 Stel	66.550.000	100%	317.550.000	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Movev dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	1 Laporan	6.581.250	1 Laporan	7.312.500	1 Laporan	8.125.000	1 Laporan	8.997.500	1 Laporan	9.831.250	1 Laporan	10.814.375	100%	51.601.875	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	100%	2 Kegiatan	19.451.340	2 Kegiatan	21.612.600	2 Kegiatan	24.014.000	2 Kegiatan	26.415.400	2 Kegiatan	29.056.940	2 Kegiatan	31.962.634	100%	152.512.914	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Sosialisasi Pedum dan Peraturan Lainnya	100%	1 Kegiatan	4.860.000	1 Kegiatan	5.400.000	1 Kegiatan	6.000.000	1 Kegiatan	6.600.000	1 Kegiatan	7.260.000	1 Kegiatan	7.986.000	100%	38.106.000	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	100%	517.065.129	100%	574.516.821	100%	638.352.013	100%	700.425.000	100%	774.788.750	100%	858.007.063	100%	3.405.154.766	Disnak Keswan	Kab LPK			
3			01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	12 Bulan	154.015.425	12 Bulan	171.128.250	12 Bulan	190.142.500	12 Bulan	209.156.750	12 Bulan	230.072.425	12 Bulan	253.079.668	100%	1.207.595.018	Disnak Keswan	Kab LPK		
3			01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	12 Bulan	45.328.005	12 Bulan	50.364.450	12 Bulan	55.960.500	12 Bulan	61.556.550	12 Bulan	67.712.205	12 Bulan	74.483.426	100%	355.405.136	Disnak Keswan	Kab LPK		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Penanggung Jawab OPD	Lokasi		
							Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Pengandaan	100%	12 Bulan	22.574.700	12 Bulan	25.083.000	12 Bulan	27.870.000	12 Bulan	30.657.000	12 Bulan	33.722.700	12 Bulan	37.094.970	100%	177.002.370	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	12 Bulan	1.944.000	12 Bulan	2.160.000	12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	2.640.000	12 Bulan	2.904.000	12 Bulan	3.194.400	100%	15.242.400	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	1890 Porsi	6.075.000	1890 Porsi	6.750.000	1890 Porsi	7.500.000	1890 Porsi	8.250.000	1890 Porsi	9.075.000	1890 Porsi	9.982.500	100%	47.632.500	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	12 Bulan	287.127.990	12 Bulan	319.031.100	12 Bulan	354.479.000	12 Bulan	389.926.900	12 Bulan	428.919.590	12 Bulan	471.811.549	100%	2.251.296.129	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.07 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	318.852.450	100%	831.280.500	100%	923.645.000	100%	1.989.500.000	100%	2.287.925.000	100%	2.631.113.750	100%	8.982.316.700	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas Operasional	100%	2 Unit	318.852.450	2 Unit	354.280.500	2 Unit	393.645.000	2 Unit	433.009.500	2 Unit	476.310.450	2 Unit	523.941.495	100%	2.500.039.395	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	100%	10 Unit	-	10 Unit	117.000.000	10 Unit	130.000.000	10 Unit	143.000.000	10 Unit	157.300.000	10 Unit	173.030.000	100%	720.330.000	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pengadaan Aset tetap Lainnya	100%	1 Unit	-	1 Unit	360.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	440.000.000	1 Unit	484.000.000	1 Unit	532.400.000	100%	2.216.400.000	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	145.309.950	100%	161.455.500	100%	179.395.000	100%	195.500.000	100%	224.825.000	100%	258.548.750	100%	1.165.034.200	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materi dan Benda Pos	100%	3000 (1.380 Lembar) 6000 (1200 Lembar)	2.835.000	3000 (1.380 Lembar) 6000 (1200 Lembar)	3.150.000	3000 (1.380 Lembar) 6000 (1200 Lembar)	3.500.000	3000 (1.380 Lembar) 6000 (1200 Lembar)	3.850.000	3000 (1.380 Lembar) 6000 (1200 Lembar)	4.235.000	3000 (1.380 Lembar) 6000 (1200 Lembar)	4.658.500	100%	22.228.500	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	100%	12 Bulan	59.466.150	12 Bulan	66.073.500	12 Bulan	73.415.000	12 Bulan	80.756.500	12 Bulan	88.832.150	12 Bulan	97.715.365	100%	466.258.665	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	100%	12 Bulan	83.008.800	12 Bulan	92.232.000	12 Bulan	102.480.000	12 Bulan	112.728.000	12 Bulan	124.000.800	12 Bulan	136.400.880	100%	650.850.480	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.09 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondusif baik	100%	100%	694.174.860	100%	789.305.400	100%	877.006.000	100%	977.250.000	100%	1.077.837.500	100%	1.239.513.125	100%	5.615.086.885	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	Roda 2 (78 Unit) Roda 4 (7 Unit)	408.969.000	Roda 2 (78 Unit) Roda 4 (7 Unit)	454.410.000	Roda 2 (78 Unit) Roda 4 (7 Unit)	504.900.000	Roda 2 (78 Unit) Roda 4 (7 Unit)	555.390.000	Roda 2 (78 Unit) Roda 4 (7 Unit)	610.929.000	Roda 2 (78 Unit) Roda 4 (7 Unit)	672.021.900	100%	3.206.619.900	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Barang Milik Daerah	100%	12 Bulan	-	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	24.200.000	12 Bulan	26.620.000	100%	110.820.000	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	1 Unit	285.205.860	1 Unit	316.895.400	1 Unit	352.106.000	1 Unit	387.316.600	1 Unit	426.048.260	1 Unit	468.653.086	100%	2.236.225.206	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Peternakan yang Berkualitas	99,74%	2%	2.440.714.356	4%	2.980.976.400	6%	3.312.196.000	8%	3.634.415.600	10%	4.007.757.160	12%	4.408.532.876	12%	20.793.592.392	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan prosuksi peternakan	100%	2%	309.825.810	4%	344.250.900	6%	382.501.000	8%	420.751.100	10%	462.826.210	12%	509.108.831	12%	2.429.263.851	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tersedianya Monitoring Evaluasi Penggunaan Alat dan Mesin Peternakan	100%	1 Laporan	12.115.170	1 Laporan	13.461.300	1 Laporan	14.957.000	1 Laporan	16.452.700	1 Laporan	18.097.970	1 Laporan	19.907.767	100%	94.991.907	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Tersedianya Bimtek Pengolahan Kompos untuk kelompok tani, tersedianya pengadaan kendaraan bermotor roda tiga	100%	1 Kali, 2 unit	297.710.640	1 Kali, 2 unit	330.789.600	1 Kali, 2 unit	367.544.000	1 Kali, 2 unit	404.298.400	1 Kali, 2 unit	444.728.240	1 Kali, 2 unit	489.201.064	100%	2.334.271.944	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase populasi dan produksi ternak yang berkualitas	99,77%	2%	767.231.190	4%	852.479.100	6%	947.199.000	8%	1.041.918.000	10%	1.146.110.790	12%	1.260.721.869	12%	6.015.660.849	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Pelaksanaan IB	99,66%	5.000 Dosis	735.388.470	5.000 Dosis	817.098.300	5.000 Dosis	907.887.000	5.000 Dosis	998.675.700	5.000 Dosis	1.098.543.270	5.000 Dosis	1.208.397.597	100%	5.765.990.337	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.03 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	Tersedianya Bimtek Teknologi Pakan Ternak	99,88%	1 kegiatan	31.842.720	1 kegiatan	35.380.800	1 kegiatan	39.312.000	1 kegiatan	43.243.200	1 kegiatan	47.567.520	1 kegiatan	52.324.272	100%	249.670.512	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Penggerak	Persentase Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Penggerak	99,44%	2%	0	4%	28.728.000	6%	31.920.000	8%	35.112.000	10%	38.623.200	12%	42.485.520	12%	176.868.720	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.04 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Tersedianya sosialisasi peraturan perundangan hewang-undangan peredaran obat hewan	98,88%	1 kegiatan	-	1 kegiatan	21.546.000	1 kegiatan	23.940.000	1 kegiatan	26.334.000	1 kegiatan	28.967.400	1 kegiatan	31.864.140	100%	132.651.540	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.04 02	Penindakan atas Penyimpangan Peredaran dan Peredaran Obat Hewan	Tersedianya Penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran Obat Hewan	100%	1 kegiatan	-	1 kegiatan	7.182.000	1 kegiatan	7.980.000	1 kegiatan	8.778.000	1 kegiatan	9.655.800	1 kegiatan	10.621.380	100%	44.217.180	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota	Terkendali dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota	100%	2%	75.417.156	4%	316.958.400	6%	352.176.000	8%	387.393.600	10%	426.132.960	12%	468.746.256	12%	2.026.824.372	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.05 02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Tersedianya pengujian sample frozen semen dan sample Ph semen	100%	2 kegiatan	12.065.760	2 kegiatan	13.406.400	2 kegiatan	14.896.000	2 kegiatan	16.385.600	2 kegiatan	18.024.160	2 kegiatan	19.826.576	100%	94.604.496	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hewan Pakan Ternak	Tersedianya Benih Ternak dan Penyediaan Bibit Hewan Pakan Ternak	100%	1 Kali, 50.000 Stek	-	1 Kali, 50.000 Stek	233.161.560	1 Kali, 50.000 Stek	259.068.400	1 Kali, 50.000 Stek	284.975.240	1 Kali, 50.000 Stek	313.472.764	1 Kali, 50.000 Stek	344.820.040	100%	1.435.498.004	100%	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.05 06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Tersedianya jasa tenaga PH/IB	100%	20 orang	63.351.396	20 orang	70.390.440	20 orang	78.211.600	20 orang	86.032.760	20 orang	94.636.036	20 orang	104.099.640	100%	496.721.872	100%	Disnak Keswan	Kab LPK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Penanggung Jawab OPD	Lokasi	
							Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
			3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya Persentase Populasi dan Produksi Ternak yang Berkualitas	98,02%	2%	1.288.240.200	4%	1.438.560.000	6%	1.598.400.000	8%	1.758.240.000	10%	1.918.064.000	12%	2.127.470.000	12%	10.144.974.600	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya pengadaan ternak untuk kelompok	96,04%	5 kelompok	1.288.240.200	5 kelompok	1.431.378.000	5 kelompok	1.590.420.000	5 kelompok	1.749.462.000	5 kelompok	1.924.408.200	5 kelompok	2.116.849.000	100%	10.100.757.420	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 02 2.06 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Pengadaan Hijauan Pakan Ternak untuk Kelompok	100%	5 kelompok	-	5 kelompok	7.182.000	5 kelompok	7.980.000	5 kelompok	8.778.000	5 kelompok	9.655.800	5 kelompok	10.621.380	100%	44.217.180	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan yang Berkualitas	100%	2%	4.554.299.115	4%	6.050.332.350	6%	6.903.317.500	8%	7.593.649.250	10%	8.353.014.175	12%	9.188.315.593	12%	42.642.927.983	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya pembangunan sarana pertanian/Pertanian	100%	-	4.554.299.115	4%	5.870.332.350	6%	6.522.591.500	8%	7.174.850.650	10%	7.892.335.715	12%	8.681.569.287	12%	40.695.978.617	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	-	-	3 Kelompok	540.000.000	4 Kelompok	600.000.000	4 Kelompok	660.000.000	4 Kelompok	726.000.000	4 Kelompok	798.600.000	100%	3.324.600.000	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	-	-	1 Kelompok	270.000.000	2 Kelompok	300.000.000	2 Kelompok	330.000.000	2 Kelompok	363.000.000	2 Kelompok	399.300.000	100%	1.662.300.000	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Pagur dan Terpeliharaan prasarana pasar ternak lainnya	100%	1 Unit	4.554.299.115	1 Unit	5.060.332.350	1 Unit	5.622.591.500	1 Unit	6.184.850.650	1 Unit	6.803.335.715	1 Unit	7.483.669.287	100%	35.709.078.617	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 03 2.04	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Persentase pelaksanaan Identifikasi dan penetapan lahan pengembalaan umum	-	-	0	-	180.000.000	6%	380.726.000	8%	418.798.600	10%	460.678.460	12%	506.746.306	12%	1.946.949.366	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 03 2.04 01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Terlaksananya Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	-	1 kali	-	1 kali	180.000.000	1 kali	200.000.000	1 kali	220.000.000	1 kali	242.000.000	1 kali	266.200.000	100%	1.108.200.000	Disnak Keswan	Kab LPK
				Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Terkelolanya Lahan Pengembalaan Umum	-	-	-	-	-	-	180.726.000	-	198.798.600	-	218.678.460	-	240.546.306	-	-	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	2%	3.005.194.414	4%	3.339.104.904	6%	3.710.116.560	8%	4.081.128.216	10%	4.489.241.038	12%	4.938.165.141	12%	23.562.950.273	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dan Tersedianya bahan pangan dan olahan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUHU)	100%	2%	987.057.090	4%	1.096.730.100	6%	1.218.589.000	8%	1.340.447.900	10%	1.474.492.690	12%	1.621.941.959	100%	7.739.258.739	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 03 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100%	20 sampel	675.853.470	20 sampel	750.948.300	20 sampel	834.387.000	20 sampel	917.825.700	20 sampel	1.009.608.270	20 sampel	1.110.569.027	100%	5.299.191.837	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 03 2.01 02	Pembatasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian PHWS	100%	12 bulan	155.601.810	12 bulan	172.890.900	12 bulan	192.101.000	12 bulan	211.311.100	12 bulan	232.442.210	12 bulan	255.686.431	100%	1.220.033.451	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 03 2.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak wabah Penyakit Hewan Menular	Terlaksananya aktive service / pelayanan kesehatan hewan	100%	15 ekor	155.601.810	15 ekor	172.890.900	15 ekor	192.101.000	15 ekor	211.311.100	15 ekor	232.442.210	15 ekor	255.686.431	100%	1.220.033.451	Disnak Keswan	Kab LPK
	Meningkatnya status kesehatan hewan dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS)		3 27 04 2.02	Pengawasan Pemusnahan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemusnahan dan Deteksi Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dan Peredaran Hewan dan bahan pangan asal hewan	100%	2%	446.437.170	4%	496.041.300	6%	551.157.000	8%	606.272.700	10%	666.899.970	12%	733.589.967	12%	3.500.398.107	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 04 2.02 01	Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kegiatan masyarakat veteriner dalam penjaminan produk pangan asal hewan yang ASUHU	100%	6 TPH	197.172.630	6 TPH	219.080.700	6 TPH	243.423.000	6 TPH	267.765.300	6 TPH	294.541.830	6 TPH	323.996.013	100%	1.545.979.473	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 04 2.02 02	Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kegiatan masyarakat veteriner dalam penjaminan produk pangan asal hewan yang ASUHU	100%	3 komoditi	136.823.985	3 komoditi	152.026.650	3 komoditi	168.918.500	3 komoditi	185.810.350	3 komoditi	204.391.385	3 komoditi	224.830.524	100%	1.072.801.394	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 04 2.02 03	Pemeriksaan Kesehatan hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kegiatan masyarakat veteriner dalam penjaminan produk pangan asal hewan yang ASUHU	100%	3 komoditi	112.440.555	3 komoditi	124.933.950	3 komoditi	138.815.500	3 komoditi	152.697.050	3 komoditi	167.966.755	3 komoditi	184.763.431	100%	881.617.241	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD	-	2%	1.179.454.770	4%	1.310.505.300	6%	1.456.117.000	8%	1.601.728.700	10%	1.761.901.570	12%	1.938.091.727	12%	9.247.799.067	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 04 2.03 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Terlaksananya peningkatan produktivitas ternak dan pelayanan kesehatan hewan	-	750 ternak	33.679.800	750 ternak	37.422.000	750 ternak	41.580.000	750 ternak	45.738.000	750 ternak	50.311.800	750 ternak	55.342.980	100%	264.074.580	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terlaksananya peningkatan produktivitas ternak dan pelayanan kesehatan hewan	-	1500 pelayanan	1.145.774.970	1500 pelayanan	1.273.083.300	1500 pelayanan	1.414.537.000	1500 pelayanan	1.555.990.700	1500 pelayanan	1.711.589.770	1500 pelayanan	1.882.748.747	100%	8.983.734.487	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Hasil Peternakan bagi Pelaku Usaha	99,83%	2%	392.245.384	4%	435.828.204	6%	484.253.540	8%	532.678.916	10%	585.946.808	12%	644.541.488	12%	3.075.494.360	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	99,83%	1 kali	383.643.184	1 kali	426.270.204	1 kali	473.633.560	1 kali	520.996.916	1 kali	573.096.608	1 kali	630.406.268	100%	3.008.046.740	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	99,83%	35 pelaku usaha	8.602.200	35 pelaku usaha	9.558.000	35 pelaku usaha	10.620.000	35 pelaku usaha	11.682.000	35 pelaku usaha	12.850.200	35 pelaku usaha	14.135.200	100%	67.447.620	Disnak Keswan	Kab LPK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Penanggung Jawab OPD	Lokasi	
							Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	99,76%	2%	77.849.100	4%	86.499.000	6%	219.450.000	8%	251.850.000	10%	265.534.500	12%	292.087.950	12%	1.193.270.550	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 06 2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	99,76%	2%	77.849.100	4%	86.499.000	6%	219.450.000	8%	251.850.000	10%	265.534.500	12%	292.087.950	12%	1.193.270.550	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 06 2.02 01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Meningkatnya Pelayanan Iapangan, Terlaksananya Bimbingan Teknis Perizinan	99,76%	50 Rekomendasi	77.849.100	50 Rekomendasi	86.499.000	96.110.000	105.721.000	116.293.100	127.921.410	100%	610.394.610	Disnak Keswan	Kab LPK				
			3 27 06 2.02 02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Terlaksananya Pengawasan terhadap izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	99,76%	-	-	-	-	90.356.000	99.391.600	109.330.760	120.263.836	100%	419.342.196	Disnak Keswan	Kab LPK				
			3 27 06 2.02 03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Tersedianya bahan Pengandaan Leaflet untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan izin usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	99,76%	-	-	-	-	9.576.000	10.533.000	11.586.960	12.745.656	100%	44.442.216	Disnak Keswan	Kab LPK				
			3 27 06 2.03	Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor)	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor)	0%	-	0	-	0	23.408.000	25.748.800	28.323.680	31.156.048	12%	108.636.528	Disnak Keswan	Kab LPK				
			3 27 06 02.03 01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengencer Obat Hewan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perizinan dan Pengembangan Usaha Pola Kemitraan/Kejasama	0%	-	-	-	-	23.408.000	25.748.800	28.323.680	31.156.048	100%	108.636.528	Disnak Keswan	Kab LPK				
			3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyuluhan	100%	2%	430.945.515	4%	824.199.300	6%	915.777.000	8%	1.007.354.700	10%	1.108.090.170	12%	1.218.899.187	12%	5.505.265.872	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/Pernakan	100%	2%	430.945.515	4%	824.199.300	6%	915.777.000	8%	1.007.354.700	10%	1.108.090.170	12%	1.218.899.187	12%	5.505.265.872	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan Desa	Terlaksananya pengembangan kapasitas penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	100%	-	-	13 Kecamatan	205.261.200	13 Kecamatan	228.068.000	13 Kecamatan	250.874.800	13 Kecamatan	275.962.280	13 Kecamatan	303.558.508	100%	1.263.724.788	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di kecamatan dan Desa	Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan petani	100%	16 orang	243.394.470	16 orang	270.438.300	16 orang	300.487.000	16 orang	330.535.700	16 orang	363.589.270	16 orang	399.948.197	100%	1.908.392.937	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 07 2.01 03	Pemediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya pemediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian/peternakan	100%	50 kelompok	133.600.996	50 kelompok	148.445.550	50 kelompok	164.939.500	50 kelompok	181.433.450	50 kelompok	199.576.795	50 kelompok	219.534.475	100%	1.047.530.765	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 07 2.01 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Terlaksananya pembentukan badan usaha milik petani	100%	1 buku	53.950.050	1 buku	59.944.500	1 buku	66.605.000	1 buku	73.265.500	1 buku	80.592.050	1 buku	88.651.255	100%	423.008.355	Disnak Keswan	Kab LPK
			3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	100%	-	-	13 kecamatan	140.109.750	13 kecamatan	155.677.500	13 kecamatan	171.245.250	13 kecamatan	188.369.775	13 kecamatan	207.206.753	100%	862.609.028	Disnak Keswan	Kab LPK
				<b>TOTAL</b>				20.738.366.656		25.142.072.129		28.239.701.700		32.441.599.541		36.467.469.086		41.026.407.597		184.055.616.713		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selama periode Renstra, perlu ditetapkan Indikatornya.

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu**  
**Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Peningkatan Sarana Peternakan yang Berkualitas	100%	2%	4%	6%	8%	10%	12%	12%
2	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan yang Berkualitas	100%	2%	4%	6%	8%	10%	12%	12%
3	Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	100%	2%	4%	6%	8%	10%	12%	12%
4	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyuluhan	100%	2%	4%	6%	8%	10%	12%	12%
5	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100%	2%	4%	6%	8%	10%	12%	100%

Target kinerja sasaran komoditi peternakan secara keseluruhan tidak ditampilkan pada tabel diatas, karena tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh kepala OPD yang bersifat kualitatif, sementara target capaian komoditi peternakan bersifat kuantitatif yang harus dicapai oleh eselon III dan turunya.

## BAB VIII PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 disusun sebagai acuan dan pedoman perencanaan pembangunan bidang peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersifat teknis dan strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang di OPD ini dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan stakeholders peternakan lainnya, hal ini telah dan sedang dilaksanakan. Diharapkan pada Rancangan Akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra-OPD dapat disajikan sesuai dengan aturan. Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk terlaksananya program dan kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan.

Demikianlah Rencana Strategis ini disusun agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pengambilan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lima tahun mendatang.

Payakumbuh, 23 September 2021

 Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**Ir. INDRA SURIANI**

NIP. 19670812 199303 2 011

MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL

TUJUAN : MENINGKATNYA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN (SEKTOR PETERNAKAN)

IK : Persentase Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas  
Pertanian (Sektor Peternakan)

IK = Persentase Kontribusi Sektor Peternakan  
terhadap PDRB

Meningkatnya Populasi dan Produktivitas  
Peternakan

IK = Persentase Peningkatan Populasi dan Produksi  
Sapi

IK = Persentase Peningkatan Populasi dan Produksi  
Kambing

Target Kinerja :  
Populasi Sapi 100.000 Ekor dan Populasi Kambing  
1.000.000 Ekor

BIDANG SARANA PETERNAKAN / BIDANG  
PERBIBITAN DAN PRODUKSI

BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN  
MASYARAKAT VETERINER DAN PENGOLAHAN

BIDANG PRASARANA DAN PERIZINAN USAHA  
PETERNAKAN / BIDANG PRASARANA DAN SARANA

BIDANG PENYULUHAN

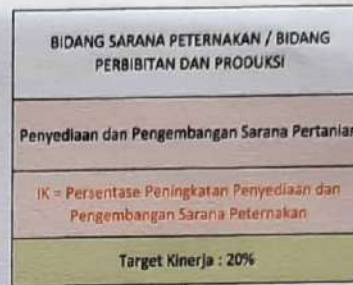
SEKRETARIAT

TUJUAN

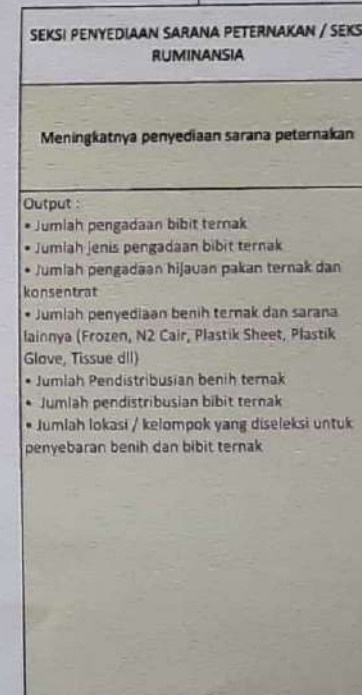
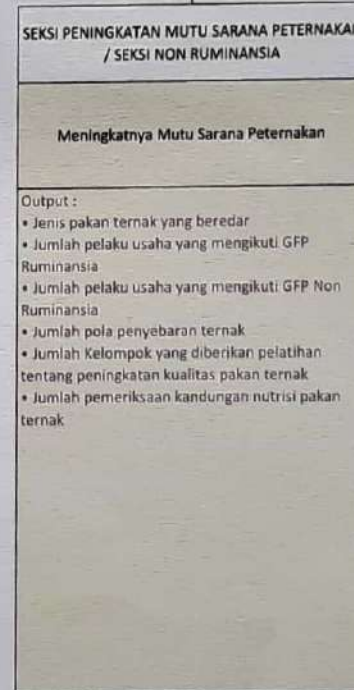
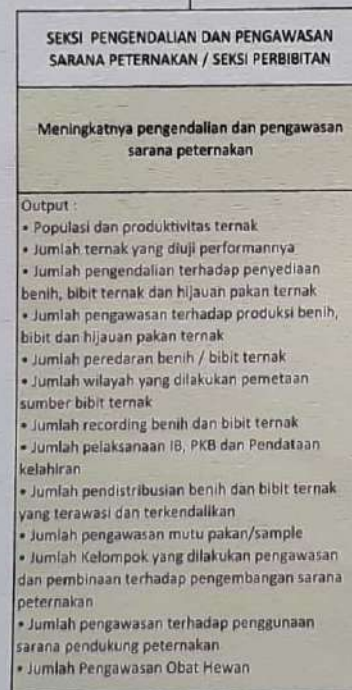
SASARAN ESS II



SASARAN ESS III (PK ESS III)



SASARAN ESS IV (PK ESS IV)



SASARAN ESS III (PK ESS III)

BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PENGOLAHAN

Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

IK = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Target Kinerja : 10%

SASARAN ESS IV (PK ESS IV)

SEKSI KESEHATAN HEWAN

Meningkatnya Kesehatan Hewan

Output :

- Jumlah Pengendalian Penyakit Hewan Menular
- Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan
- Jumlah Pengawasan Peredaran Obat Hewan
- Jumlah Pengendalian Penyakit Zoonosis

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Veteriner

Output :

- Jumlah Unit Usaha Peternakan dan produk hewan yang Aman, sehat, utuh dan Halal (ASUH)
- Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan
- Jumlah Unit Usaha Peternakan yang menerapkan Sanitasi dan Higienis serta memiliki Sertifikat NKV
- Jumlah Pengawasan pemotongan Hewan
- Jumlah Unit Usaha Peternakan yang Menerapkan prinsip Kestrawan

SEKSI PENGAWASAN UNIT USAHA HEWAN DAN PRODUK HEWAN/SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

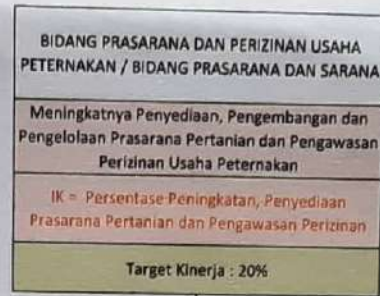
Meningkatnya Pengolahan produk hasil peternakan dan Pemasaran

Output :

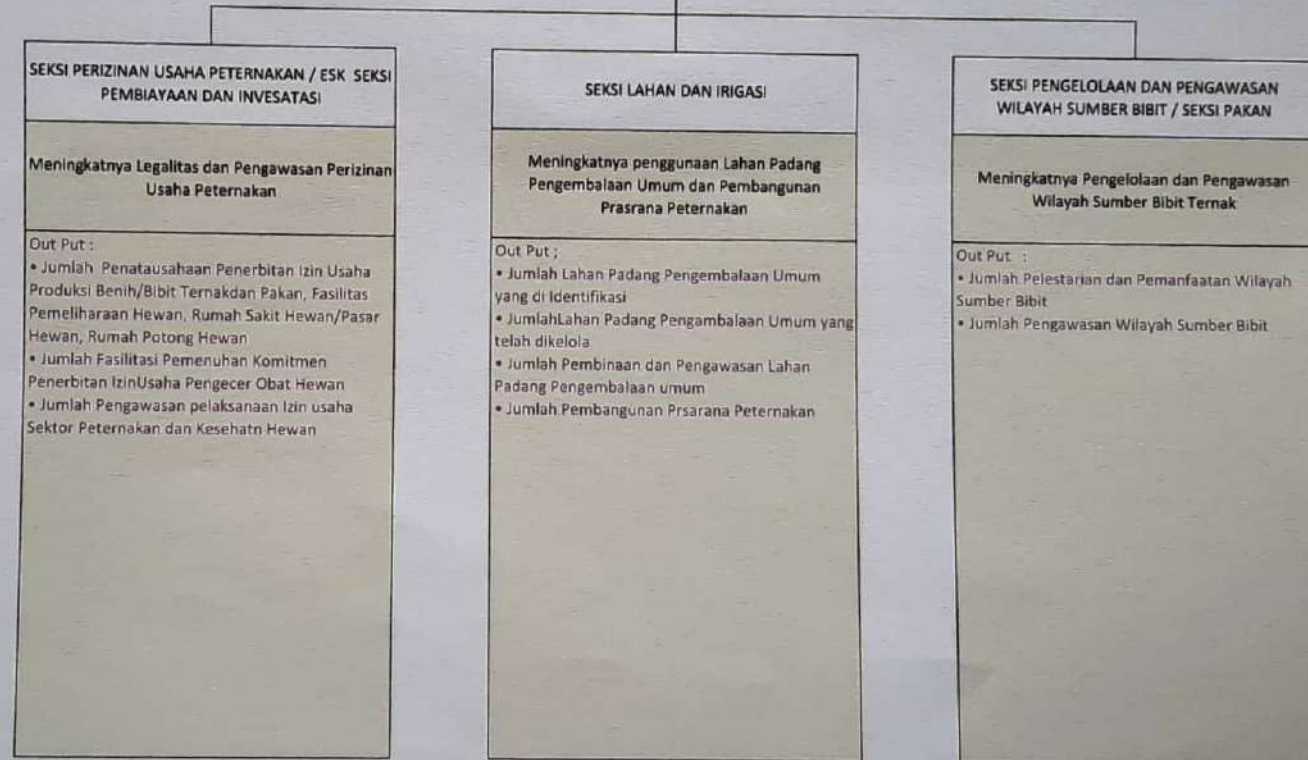
- Jumlah tumbuh dan berkembangnya Pelaku Usaha Pengolah Hasil Peternakan yang produktif
- Jumlah Produksi dan peredaran produk hasil olahan Peternakan
- Jumlah Jaringan dan promosi Pemasaran Produk Peternakan



SASARAN ESS III (PK ESS III)

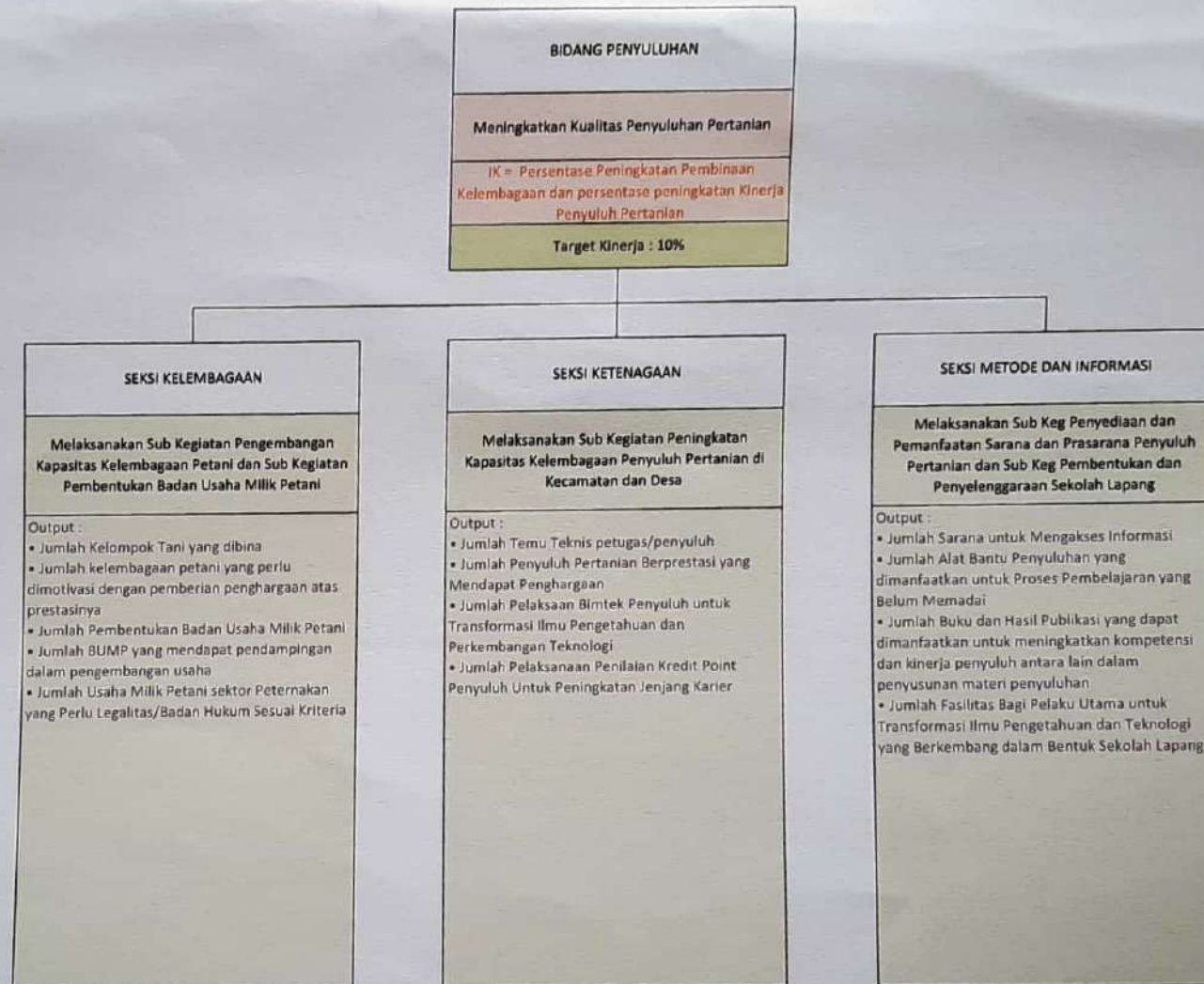


SASARAN ESS IV (PK ESS IV)

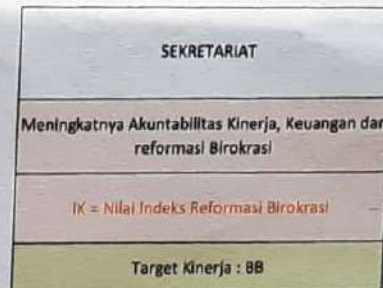


SASARAN ESS III (PK ESS III)

SASARAN ESS IV (PK ESS IV)



SASARAN ESS III (PK ESS III)



SASARAN ESS IV (PK ESS IV)

